

Dr. Indra Kertati, M.Si,
Dr. Susetyo Darmanto, ST,SE, MM
Dr. Totok Tumangkar.SH.Mhum



Model Aksi Perempuan

Kepala Keluarga Miskin Menghadapi Perubahan
Konstansi Pasca Meredupnya Covid-19

**MODEL AKSI PEREMPUAN KEPALA KELUARGA
MISKIN MENGHADAPI PERUBAHAN
KONSTALASI PASCA MEREDUPNYA COVID-19**

**Dr. Indra Kertati, M.Si
Dr. Susetyo Darmanto, ST,SE, MM
Dr. Totok Tumangkar.SH.Mhum**



PT. PENA PERSADA KERTA UTAMA

**MODEL AKSI PEREMPUAN KEPALA KELUARGA
MISKIN MENGHADAPI PERUBAHAN
KONSTALASI PASCA MEREDUPNYA COVID-19**

Penulis:

Dr. Indra Kertati, M.Si
Dr. Susetyo Darmanto, ST,SE, MM
Dr. Totok Tumangkar.SH.Mhum

Editor:

Dr. Wardayani, SE.M.Si
Jeperson Hutahaeon, M. Kom

ISBN : 978-623-455-706-0

Design Cover :

Yanu Fariska Dewi

Layout :

Hasnah Aulia

PT. Pena Persada Kerta Utama

Redaksi:

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah. Email: penerbit.penapersada@gmail.com
Website: penapersada.id. Phone: (0281) 7771388

Anggota IKAPI: 178/JTE/2019

All right reserved
Cetakan pertama: 2023

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa
izin penerbit

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penulis mempersembahkan Buku dengan judul Model Aksi Perempuan Kepala Keluarga Miskin Menghadapi Perubahan Konstalasi Pasca Meredupnya Covid-19. Buku ini merupakan gambaran tentang proses recovery perempuan kepala keluarga miskin menghadapi covid-19. Proses yang tidak sederhana bagi Kepala Keluarga yang disandang perempuan miskin memberikan pembelajaran akan kerja keras dan daya lenting yang dinamis.

Perempuan kepala keluarga miskin yang pada saat pandemic covid-19 harus berjuang keras, sedikit demi sedikit mulai membuka jalan untuk meretas kerentanan. Aksesibilitas yang mulai terbuka mendorong mereka untuk semakin peka terhadap perubahan jaman. Dukungan keluarga terutama anak-anak menjadi penguat untuk bangkit dan berdiri setiap kali jatuh. Tak banyak kata, kerja dan kerja untuk menghidupi keluarga menjadi penting dalam hidup perempuan kepala keluarga miskin.

Berbagai temuan kajian menunjukkan semakin kompleksnya persoalan perempuan kepala keluarga miskin, hingga diperlukan perlakuan khusus untuk menanganinya. Persoalan hak-hak anak-anak mereka yang jauh dari jangkauan, juga tidak luput dari kaca mata kajian ini. Pemerintah dan pemerintah Kota sudah berupaya, namun jangkauan untuk meraih mereka belum sepenuhnya terlampaui.

Kajian ini menjadi fiding yang menghasilkan naskah akademik untuk perlindungan anak. Ini adalah wujud keberpihakan untuk mengurai persoalan keluarga perempuan kepala keluarga miskin. Naskah akademik dan Ranperda Perlindungan Anak menjadi salah satu kebijakan public untuk memenuhi hak-hak anak-anak keluarga perempuan miskin sekaligus hak-hak anak-anak di Kota Surakarta.

Dalam pembuatan buku ini hingga selesainya butuh proses dan bantuan dari pihak-pihak yang ikut dalam memberikan masukan dan support yang tinggi kepada penulis. Oleh karena itu, penulis harus menyampaikan apresiasi atau rasa terima kasih

kepada semua pihak yang telah membantu dalam upaya penerbitan buku ini. Penulis menyadari bahwa buku ini masih ada kekurangannya dan memerlukan penyempurnaannya. Tidak akan pernah berhenti melangkah untuk meningkatkan kualitas dan tak akan berhenti untuk terus menyuarakan perempuan kepala keluarga miskin untuk meraih impian. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkannya.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KEMISKINAN PEREMPUAN	4
BAB III PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MISKIN	11
BAB IV KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	15
A. Kondisi Kesejahteraan Sosial	15
B. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	28
BAB V KEMISKINAN KOTA SURAKARTA	37
A. Garis Kemiskinan	37
B. Persentase Penduduk Miskin	41
C. Jumlah Penduduk Miskin	43
BAB VI INDEKS KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI KOTA SURAKARTA	44
A. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan	44
B. Tingkat Pengangguran Terbuka dan Partisipasi Angkatan Kerja	47
BAB VII MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA	51
A. Perempuan Kepala Keluarga Miskin	51
B. Model Pemberdayaan	62
BAB VIII PENUTUP	69
DAFTAR PUSTAKA	70

**MODEL AKSI PEREMPUAN KEPALA KELUARGA
MISKIN MENGHADAPI PERUBAHAN
KONSTALASI PASCA MEREDUPNYA COVID-19**

BAB I

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari PBB dalam memitigasi penanganan pandemi Covid-19 yang disampaikan oleh Presiden Majelis Umum PBB, Abdulla Shahid, dalam sambutannya pada The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pada Rabu, 25 Mei 2022. Pemerintah telah berupaya keras mengatasi pandemic covid-19 dengan program dan kebijakan public, untuk mengatasi dampak covid-19 baik dari sisi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan social.

Melandainya persebaran Covid-19 menunjukkan bukti keberhasilan penyelenggaraan vaksin yang diselenggarakan pemerintah. Hampir semua Kabupaten Kota telah melaksanakan vaksin 80-90 persen. Keberhasilan ini juga karena partisipasi masyarakat yang tinggi serta kesadaran bahwa covid-19 dengan berbagai variasinya telah menimbulkan dampak yang menakutkan.

Pandemi covid-19 telah meningkatkan jumlah penduduk miskin hampir diseluruh pelosok Indonesia. Tahun 2022 keadaan mulai membaik. Jika tahun 2020 penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar 3.980.900 jiwa, meningkat tahun 2021 sebesar 4.109.750 jiwa, maka tahun Maret 2022 berkurang 102,57 ribu jiwa dibanding posisi September 2021. Jumlah tersebut juga menurun 78,31 ribu jiwa jika dibandingkan dengan posisi Maret 2021. Dengan demikian, angka kemiskinan di Jawa Tengah pada Maret 2022 ini turun 32 basis points (BPS) dibanding posisi September 2021 dan juga menyusut 86 bps dibanding posisi Maret 2021. Meskipun turun, angka kemiskinan di Jawa Tengah ini masih lebih tinggi dibanding sebelum terjadi pandemi Covid-19. Jumlah penduduk miskin tahun 2019 tercatat 3,68 juta jiwa atau 10,58% (BPS 2022). Data selaras juga terjadi di Kota Surakarta Jawa Tengah dengan jumlah penduduk miskin tahun 2020 sebesar 47.030 meningkat tahun 2021 sebesar

48.790 jiwa, jumlah ini lebih besar dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebesar 45.180 jiwa.

Pandemi berdampak pada meningkatnya penduduk miskin tidak dapat dihindari. Perubahan tingkat kemiskinan dan jumlah orang miskin yang ditunjukkan ditunjukkan oleh kajian SMERU yaitu untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi 4,2 dan 3 persen, tingkat kemiskinan masing-masing meningkat sebesar 0,48 dan 1,44 poin. Persentase ini menyiratkan tambahan 1,3 dan 3,9 juta. orang miskin. Sementara itu, jika pertumbuhan ekonomi tahun 2020 diproyeksikan sebesar 2,1, 1,2, dan 1 persen, maka angka kemiskinan akan meningkat masing-masing sebesar 2,2, 3, dan 3,1poin, yang berarti 5,9, 8, dan 8,5 juta lebih banyak orang menjadi miskin (Syukri 2021).

Kemiskinan menimpa semua orang tanpa memandang jenis kelamin, namun beberapa fakta menunjukkan perempuan miskin memiliki beban lebih berat dibandingkan laki-laki miskin. Beberapa studi mengungkapkan perempuan memiliki beban besar saat mereka berada pada posisi miskin. Bank Dunia mencatat perbedaan tingkat kemiskinan antara rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan dan laki-laki berasal dari perbedaan gender dalam pendapatan, akses ke pekerjaan atau kontrol atas sumber daya (UNDP Turkmenistan 2021). Temuan beberapa kajian menunjukkan bahwa kepala rumah tangga perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan dibandingkan dengan rumah tangga yang dikepalai laki-laki). Perempuan kepala rumah tangga di kelompok miskin harus bekerja dua kali lipat, karena mereka memiliki tanggungan anak dan tidak ada pasangan untuk berkontribusi pada pendapatan rumah tangga (Munoz Boudet et al. 2018).

Perempuan miskin bisa jadi berangkat dari keluarga miskin yang dibawa hingga mereka dewasa, kerentanan yang terjadi telah membawa perempuan masuk dalam lingkaran kemiskinan (Gani 2021). Pandemi covid-19 telah menutup akses informasi mereka, sehingga situasi miskin bagi mereka semakin nyata. Mereka termarginal dalam hal mengakses informasi termasuk informasi dari social media (Suharnanik 2020).

Studi yang dilakukan oleh Sylvia Chant (Chant 1997) di Mexico, Costa Rica dan Philippines menunjukkan bahwa rumah tangga yang dikepalai wanita di seluruh dunia umumnya dianggap sebagai yang termiskin dari yang miskin. Priyanka Julka dan Sukanya Das (2016) mengutip beberapa catatan Buvinic dan Gupta (1997), Fuwa (2000), dan Swarup dan Rajput (1994) yang melakukan kajian di Panama dan India menunjukkan bahwa terdapat tiga saluran yang bisa menentukan mengapa rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan lebih miskin daripada yang dikepalai oleh laki-laki, yaitu (1) rumah tangga yang dikepalai perempuan biasanya memiliki lebih banyak tanggungan yaitu rasio non-pekerja terhadap pekerja lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga lain; (2) kepala perempuan bekerja dengan upah lebih rendah dan memiliki akses yang lebih sedikit ke aset dan sumber daya produktif dibandingkan dengan laki-laki; dan (3) perempuan memiliki kendala waktu dan mobilitas karena mereka berada di sektor domestik yang melingkupinya (Lopez and Stack 2017). Perempuan sebagai kepala keluarga memiliki resiko bertambahnya beban kegiatan yang ditanggungnya di sektor publik dan domestik. Perempuan yang menjadi kepala keluarga di dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa hal antara lain: karena perceraian, suami merantau, perempuan yang hamil dan mempunyai anak setelah di tinggalkan oleh laki-laki, serta karena suami meninggal dunia (Nindya Putri, Saprudin Darwis, and Ginanjar Kamil Basar n.d.).

Kota Surakarta memiliki jumlah Perempuan Kepala Keluarga dari kelompok penduduk miskin sebanyak 4.935 orang. Mereka tersebar di 5 Kecamatan secara merata. Selama pandemic Covid-19 sebagian besar telah mendapatkan bantuan baik dari pemerintah, pemerintah daerah maupun tetangga, dan para dermawan. Model penanggulangan kemiskinan yang diterapkan Sebagian telah mampu mempertahankan kehidupannya, namun harus diakui upaya besar-besaran dilakukan oleh perempuan dan keluarganya. Upaya yang dilakukan adalah dengan melenting dari satu mata pencaharian ke mata pencaharian lainnya.

BAB II

KEMISKINAN PEREMPUAN

Fenomena kemiskinan perspektif gender berakar pada gerakan perempuan internasional dan didasarkan pada kebutuhan untuk mengakui bahwa kemiskinan mempengaruhi laki-laki dan perempuan dengan cara yang berbeda. Telaah kemiskinan dalam perspektif gender dimungkinkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang meningkatkan atau menurunkan kemungkinan individu mengalami kemiskinan, dan bagaimana ciri-ciri kemiskinan berbeda bagi laki-laki dan perempuan. Perspektif gender meningkatkan konseptualisasi kemiskinan karena melampaui analisis deskriptif untuk melihat penyebab kemiskinan sebagai suatu proses, dengan demikian memberikan perspektif yang lebih dinamis. Selain itu, perspektif gender berkontribusi pada desain kebijakan yang memungkinkan langkah-langkah untuk diarahkan pada kemiskinan yang parah dan populasi yang paling rentan.

Kemiskinan dan gender adalah konsep yang secara historis ada diperlakukan dengan cara yang cukup independen, yang menjelaskan secara spesifik pentingnya masing-masing telah diberikan pada kebijakan public dan kajian agenda . Kemajuan penting telah dibuat dalam pengembangan teoritis kedua konsep selama beberapa dekade terakhir. Dalam kasus kemiskinan, meskipun definisi yang paling sering mengacu pada kurangnya pendapatan, berbagai pendekatan telah muncul sehubungan dengan konseptualisasi dan pengukurannya.

Konsep gender, sebagai pendekatan teoretis dan metodologis terhadap konstruksi budaya perbedaan seksual yang menyinggung ketidaksetaraan antara jenis kelamin perempuan dan laki-laki serta cara kedua aspek tersebut berhubungan satu sama lain, telah menjadi kategori analisis yang semakin penting (Godoy and Montaña 2004). Analisis kemiskinan dari perspektif gender mengembangkan kedua konsep tersebut untuk membantu

memahami sejumlah proses yang melekat pada fenomena ini, dinamika dan karakteristiknya dalam konteks tertentu. Ini membantu menjelaskan mengapa kelompok-kelompok tertentu, berdasarkan jenis kelamin mereka, lebih mungkin terpengaruh oleh kemiskinan. Oleh karena itu, pentingnya konseptual, metodologis, dan politik untuk mendekati masalah kemiskinan, dari perspektif gender.

Berbagai pendekatan untuk mendefinisikan kemiskinan dapat diidentifikasi. Di antara yang paling penting, Ruggeri, Saith dan Stewart (Ruggeri Laderchi, Saith, and Stewart 2003) memilih pendekatan moneter, pendekatan kapasitas, dan eksklusi sosial dan pendekatan partisipatif. Kategori-kategori ini merupakan cerminan dari perdebatan yang lebih luas tentang bagaimana perkembangan kekayaan dan tidak dinikmatinya manfaat-manfaatnya harus dipahami. Pendekatan moneter, yang mendefinisikan kemiskinan sebagai penurunan konsumsi atau pendapatan, dan didasarkan pada garis kemiskinan, ini merupakan pendekatan yang paling umum digunakan.

Pendekatan lain telah mendapatkan penerimaan yang meningkat sejauh mereka telah mengungkapkan keterbatasan perspektif moneter dalam mendefinisikan kemiskinan, dan telah berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang masalah ini. Pendekatan kapasitas, yang dipelopori oleh Amartya Sen, menolak pendapatan moneter sebagai satu-satunya ukuran kesejahteraan, yang ia definisikan sebagai kebebasan individu untuk menjalani kehidupan yang memungkinkan mereka memenuhi kapasitasnya. Kemiskinan diartikan sebagai kurangnya sumber daya yang menghalangi orang untuk melakukan kegiatan dasar tertentu seperti tetap hidup dan menikmati hidup yang panjang dan sehat, mereproduksi dan mewariskan budaya mereka kepada generasi mendatang, berinteraksi sosial, memiliki akses ke pengetahuan dan menikmati kebebasan berekspresi dan kebebasan berekspresi pikiran (Terjesen 2014).

Menurut pendekatan ini, perjuangan melawan kemiskinan dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pendekatan eksklusi sosial mempelajari

karakteristik struktural masyarakat, yang melahirkan proses dan dinamika yang mengecualikan individu atau kelompok dari partisipasi sosial secara penuh. Itu membuat referensi khusus untuk distribusi peluang dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi eksklusi, dan untuk mempromosikan inklusi baik di pasar tenaga kerja maupun proses sosial.

Dalam pendekatan partisipatif, masyarakat miskin mendefinisikan kemiskinan berdasarkan analisis realitas mereka sendiri, dengan memasukkan aspek-aspek yang dianggap penting. Dari sudut pandang ini, mengatasi kemiskinan berarti memberdayakan kaum miskin (Ruggeri, Saith dan Stewart, 2003; Arriagada, 2003) (Ruggeri Laderchi et al. 2003).

Kritik lain terhadap konseptualisasi dan pengukuran kemiskinan berdasarkan pendapatan dan konsumsi ditemukan dalam teori-teori baru yang memperluas dan memperdalam konsep kemiskinan. Salah satunya adalah modal sosial, yang secara umum dapat didefinisikan sebagai “sumber daya tidak berwujud yang memungkinkan atau mempersiapkan individu atau kelompok untuk memperoleh keuntungan melalui hubungan sosial mereka” (Miranda, 2003). Pendekatan ini menyoroti dimensi kemiskinan lain yang kurang terlihat, yaitu adanya “sejumlah variabel yang tidak mudah diukur secara moneter dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap kondisi kemiskinan. Variabel-variabel ini terkait dengan komponen psiko-sosial kemiskinan” (Ijaiya and Adesina-Uthman 2019).

Modal sosial memberikan gambaran menyeluruh tentang proses pembangunan dan kemiskinan, termasuk aspek politik, sosial dan ekonomi. Pendekatan geografis juga memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih baik tentang kemiskinan dengan mempelajari ciri-ciri konteks spasial di mana orang miskin tinggal, dan dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti konsentrasi dan akses ke aset alam dan fisik. Pendekatan ini mencerminkan heterogenitas fenomena dan menunjukkan dengan tepat kebutuhan populasi. Secara gabungan, pendekatan dan konsep yang berbeda ini telah mengungkap kompleksitas kemiskinan dan membantu membangun konsensus yang lebih

besar bahwa kemiskinan adalah fenomena dengan banyak dimensi dan banyak penyebab, yang memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara. Dengan kata lain, itu adalah fenomena multidimensi dan heterogen, yang mencakup kebutuhan material, non-material, subyektif dan budaya.

Pendekatan-pendekatan ini telah menunjukkan perlunya memahami kemiskinan sebagai suatu proses daripada suatu keadaan. Meskipun kemiskinan dapat dianggap sebagai situasi yang bertahan dari waktu ke waktu, dalam banyak kasus kemiskinan dapat bervariasi dan dapat berubah dalam waktu singkat, terutama sebagai fungsi pekerjaan dan pengangguran. Perspektif yang lebih luas, sejumlah konsep berkontribusi dalam analisis kemiskinan, seperti ketimpangan, kerentanan, dan pengucilan (Kaundjua 2007).

Meskipun demikian, seperti yang dikatakan Arriagada (2003), penting untuk membedakan konsep-konsep ini secara analitis karena pendekatan yang dipilih mencakup jenis kebijakan dan program yang akan dikembangkan untuk menghadapi fenomena tersebut. Konsep ketimpangan, diambil sebagai tingkat konsentrasi dan polarisasi distribusi pendapatan perkotaan menurut kelompok populasi, "walaupun merupakan serangkaian masalah yang lebih luas daripada kemiskinan, di Amerika Latin ini merupakan titik referensi tambahan yang diperlukan, karena memiliki penyebab yang sama. dan terlebih lagi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran sosial yang diperlukan untuk memberantas kemiskinan perkotaan, dan periode waktu di mana tujuan ini diharapkan dapat dicapai di berbagai negara" (Ewuim, Agbodike, and Igbokwe-Ibeto 2015).

Konsep kerentanan membantu mengidentifikasi beberapa proses yang menyebabkan kemiskinan. Meskipun tidak identik dengan kemiskinan, namun hal itu berimplikasi pada peningkatan kerentanan individu atau rumah tangga terhadap kemiskinan. Kerentanan dikaitkan dengan aspek eksternal yang terdiri dari risiko yang menjadi tanggung jawab individu atau rumah tangga, seperti kenaikan harga, kehilangan pekerjaan atau kecelakaan, dan aspek internal yang mengacu pada ketidakcukupan sumber daya

untuk menghadapi risiko dan mencegah kerugian besar. Salah satu aspek positif dari konsep ini adalah mencakup sumber daya yang bersifat material dan non-material, seperti penyisipan dalam jaringan sosial (Owusu-Afriyie and Nketiah-Amponsah 2014).

Konsep pengecualian memiliki makna ganda. Aspek pertama mengacu pada tindakan pengusiran seseorang dari ruang yang ditempatinya sebelumnya, seperti memecat pekerja atau menolak akses kelompok berpenghasilan rendah ke layanan tertentu. Kedua mengacu pada merampas sebagian dari hak-hak individu. Pengecualiannya pada fenomena yang berasal dari tindakan yang dapat menyiratkan tanggung jawab eksternal dan kewajiban dari pihak agen publik dan masyarakat sipil untuk mengambil tindakan. Ini adalah konsep relasional karena penekanannya tidak diletakkan pada sumber daya moneter tetapi pada hubungan individu dengan keluarga, masyarakat dan Negara. Biasanya, perbedaan dibuat antara bentuk-bentuk pengecualian yang berbeda, meskipun terkait, seperti: pengecualian dari pasar tenaga kerja, barang dan jasa; pengucilan politik dan kelembagaan, yaitu dari partisipasi dan representasi; eksklusi budaya, atau eksklusi dari identitas, pengetahuan dan nilai-nilai; dan pengecualian spasial, yaitu dari wilayah dan lokasi geografis. Mekanisme eksklusi dapat bersifat institusional atau sosiokultural.

Selain menekankan bahwa kemiskinan mencakup kekurangan sumber daya material, sosial dan budaya, perspektif gender mengungkapkan sifat heterogen kemiskinan di mana laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab dan pengalaman yang berbeda dan akibatnya kepentingan dan kebutuhan mereka juga berbeda. Berdasarkan dimensi relasional dari konsep gender, sejauh mengacu pada hubungan antara laki-laki dan perempuan, kemiskinan perempuan dianalisis dengan mempertimbangkan keluarga dan lingkungan sosial. Sehubungan dengan keluarga, perspektif gender meningkatkan pemahaman tentang bagaimana fungsi rumah tangga, karena mengungkapkan hierarki dan distribusi sumber daya, dan dengan demikian mempertanyakan gagasan bahwa sumber daya dalam rumah tangga didistribusikan secara adil dan bahwa kebutuhannya anggotanya sama.

Secara konkret, kemiskinan tidak dipahami hanya sebagai “konsep deskriptif yang menetapkan jarak dari ambang pendapatan atau sumber daya, tetapi mencakup penjelasan tentang ketidaksetaraan dalam hubungan kekuasaan dalam rumah tangga” (ECLAC, 2003b). Perspektif gender juga memberikan perspektif multidimensi karena memperhitungkan peran ganda yang dimainkan oleh laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, pasar tenaga kerja dan masyarakat, serta faktor-faktor yang saling berhubungan dengan gender, seperti usia dan kelompok etnis.

Adapun dinamika kemiskinan, perspektif gender menegaskan pentingnya memahami fenomena sebagai proses bukan gejala, sehingga terhindar dari persepsi statis “kemiskinan sebagai potret” yang “menaturalkan dan membekukan relasi sosial, nyaris tidak mengakui gender dan generasi”. hubungan, dan tidak membantu untuk memahami proses atau potensi sebelumnya, maupun kemiskinan dalam dimensi historis, makro-sosial dan rumah tangga mikro”.

Kontribusi lain dari perspektif gender untuk analisis kemiskinan adalah mengungkap diskriminasi baik di ruang publik maupun di rumah tangga, mengungkapkan dalam kedua kasus tersebut hubungan kekuasaan dan distribusi sumber daya yang tidak setara. Dalam pengertian itu, adalah mungkin untuk menghubungkan perspektif umum dan khusus dan menghubungkan pembangunan ekonomi dan sosial dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, dengan demikian menunjukkan hubungan antara kedua tingkat dan membantu memahami kompleksitas proses yang ditimbulkan oleh fenomena kemiskinan(Chant 2008).

Analisis konseptual tentang kemiskinan ini sangat penting karena, seperti yang telah dikuatkan oleh sejumlah kajian (Ruggeri Laderchi et al. 2003), definisi kemiskinan juga mendefinisikan indikator pengukurannya—seperti yang ditetapkan, tidak dikonseptualisasikan tidak dapat diukur—dan jenis kebijakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Meskipun demikian, penting agar perdebatan tentang konseptualisasi kemiskinan tidak dibatasi oleh kemungkinan-kemungkinan pengukurannya, yaitu melampaui

kemungkinan-kemungkinan pengukuran yang ada. Menurut konseptualisasi kemiskinan yang lebih luas ini, otonomi ekonomi dan kekerasan gender merupakan dimensi penting lainnya dalam menunjukkan bagaimana kemiskinan memengaruhi laki-laki dan perempuan secara berbeda.

BAB III

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MISKIN

Pemberdayaan adalah sebuah proses, dari tidak berdaya menjadi berdaya. Teori pemberdayaan menekankan dua hal utama perspektif pada proses ini: yaitu satu lagi individualistis, yaitu melalui kapasitas individu perempuan dan pelaksanaan pilihan pribadi secara bebas (Kabeer 1999) dan satu lagi kolektivistik, yaitu melalui perilaku kolektif dan kepatuhan terhadap norma-norma budaya yang menekankan pertumbuhan kolektif (Budgeon 2015). Intervensi keuangan mikro didasarkan pada asumsi bahwa partisipasi dalam intervensi memiliki efek pemberdayaan dan merangsang pertumbuhan individu. Sayangnya intervensi ini sering diterapkan dalam budaya kolektivistik yang lebih tradisional. Dengan demikian, sangat penting untuk melakukan kajian budaya untuk menghindari bias budaya dan memahami hasil pemberdayaan dalam konteks yang berbeda.

Kerangka kerja pemberdayaan perempuan dapat dibedakan menjadi tiga dimensi, yaitu pribadi, relasional (sehubungan dengan yang relevan ain seperti pasangan, keluarga, dan masyarakat), dan masyarakat (pada konteks sosial yang lebih besar) pemberdayaan. Studi empiris berdasarkan literatur dari berbagai disiplin ilmu, terutama psikologi, ekonomi perkembangan, dan sosiologi memerinci tiga langkah.

Berdasarkan literatur pemberdayaan perempuan menggambarkan bagaimana hal itu telah diselidiki sejauh ini dalam konteks layanan keuangan mikro lintas budaya. Model Perempuan Tiga Dimensi meningkatkan pemahaman tentang pemberdayaan perempuan yang memerlukan layanan keuangan mikro yang dapat membantu untuk meningkatkan keuangan keluarga. Model dengan menawarkan layanan keuangan mikro (yaitu, pinjaman mikro, bisnis pelatihan, program tabungan) saat ini adalah salah satu yang paling menonjol untuk mengurangi kemiskinan dan

memberdayakan masyarakat yang kurang beruntung, termasuk perempuan (Armendáriz dan Morduch, 2010; Kulkarni, 2011).

Asumsi yang mendasarinya adalah pasar dan partisipasi akan memiliki efek yang membebaskan dan memberdayakan perempuan. Ideologi neoliberal ini telah dikritik karena alai untuk mengakui pengetahuan dan praktik lokal, dan mungkin bahkan mereproduksi bentuk-bentuk penindasan dengan memperluas laki-laki (kulit putih). hak atas perempuan (misalnya, Mohanty, 1995; Roodman, 2011; Bateman dan Chang, 2012; Kurti, s et al., 2016). Ulasan tentang dampak akses ke program kredit mikro pada pemberdayaan perempuan telah memberikan hasil yang tidak meyakinkan (misalnya, Van Rooyen et al., 2012; Duvendack et al., 2014; Vaessen et al., 2014). Selain itu, kontroversi layanan keuangan mikro menawarkan konteks yang unik bagi perempuan.

Dalam bidang ekonomi pembangunan pemberdayaan perempuan didefinisikan sebagai proses yang dilalui perempuan untuk memperoleh kemampuan untuk membuat pilihan hidup strategis dalam konteks di mana ini kemampuan sebelumnya ditolak untuk mereka . Kemampuan untuk melaksanakan pilihan individu adalah berdasarkan tiga elemen yang saling terkait - sumber daya, agensi, dan prestasi. Sumber daya mengacu pada materi, manusia, dan social harapan dan alokasi. Agensi adalah kemampuan atau rasa kemampuan untuk menentukan tujuan seseorang, menindaklanjutinya, dan memutuskan tujuan mereka hasil hidup strategis sendiri. Prestasinya bermacam-macam berbagai hasil mulai dari peningkatan kesejahteraan hingga pencapaian keterwakilan perempuan yang setara dalam politik (Kabeer 2015).

Asumsi yang mendasarinya adalah pemberdayaan perempuan adalah proses memiliki dan menggunakan sumber daya dalam agen cara untuk mencapai prestasi tertentu (e.g., Kabeer, 1999; Malhotra et al., 2002; Bali Swain dan Wallentin, 2009; Khan dan Khan, 2016). Pemberdayaan adalah proses yang memungkinkan orang untuk bertindak dan meningkatkan isu-isu yang penting bagi individu mereka kehidupan, komunitas mereka, dan masyarakat mereka (e.g., Bandura, 1986; Halaman dan Czuba,

1999; Maton, 2008; Cattaneo dan Chapman, 2010). Definisi ini menekankan perluasan perempuan kapasitas individu dan latihan bebas dari pilihan pribadi (lihat Budgeon, 2015; Kurti,s et al., 2016).

Tindakan memilih tidak menyamakan hasil progresif bagi perempuan, karena pilihan individu perempuan secara historis dan structural dikondisikan (untuk debat tentang feminisme pilihan lihat Budgeon, 2015). Memang, ini fokus pada kebebasan individu perempuan dan pertumbuhan didasarkan pada Western Education Industrialized Rich Demokrasi (WEIRD; Henrich et al., 2010) realitas dan mungkin meminggirkan pengalaman perempuan dalam masyarakat yang berbeda (misalnya, Carby, 1997; Kurti,s dan Adams, 2015). Dekolonial psikologi feminis menekankan pentingnya menjadi sensitive konteks budaya, dan mendapatkan wawasan dari (daripada mengabaikan atau mendevaluasi) pengalaman perempuan di bawah negara- negara berpenghasilan (menciptakan ruang dunia mayoritas dalam sastra di bidang ini untuk mencerminkan mayoritas umat manusia yang mendiami masyarakat. (Kurti,s dan Adams, 2015; Kurti,s et al., 2016).

Sejalan dengan perspektif ini, telah lahir konsepsi pemberdayaan perempuan melalui kebersamaan daripada kepemilikan bisnis individu, dengan demikian mengikuti norma-norma budaya menekankan kebersamaan daripada pendekatan individu (Kurti,s et al., 2016). Stromquist (1995) menggambarkan pemberdayaan sebagai konsep multifase termasuk komponen yang berbeda mulai dari pemahaman tentang penyebab penindasan mereka untuk bertindak Bersama sebagai kelompok menuju perubahan sosial.

Pekerjaan membangun atas asumsi bahwa partisipasi dalam kelompok kecil dengan agenda kolektif adalah langkah pertama menuju pemberdayaan perempuan. Agen individu dan kolektif dengan demikian sangat penting dalam pengembangan pemberdayaan perempuan (Stromquist, 2015). Pemberdayaan perempuan merupakan langkah-langkah seperti agensi, otonomi, kapasitas untuk bertindak, penentuan nasib sendiri, dan kepercayaan diri (misalnya, Cheston dan Kuhn, 2001; Malhotra et al., 2002; Narayana, 2005; Hansen, 2015).

Semua definisi menekankan bahwa pemberdayaan perempuan adalah konsep multi fase, yang mencakup komponen yang berbeda dan menganggap bahwa pemberdayaan adalah proses dari keberadaan tidak berdaya menjadi berdaya. Menggabungkan ini pemberdayaan perempuan adalah proses multifase yang melibatkan kesadaran individu maupun kolektif, keyakinan, dan perilaku yang tertanam dalam struktur social konteks budaya tertentu.

BAB IV KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

A. Kondisi Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengetahui status kemampuan dasar penduduk, meliputi: Angka Harapan Hidup, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Per Kapita untuk mengukur akses terhadap sumberdaya untuk mencapai standar hidup layak. IPM Kota Surakarta dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami perkembangan meningkat yaitu, dari sebesar 80,85 menjadi sebesar 82,62. Kondisi tersebut relevan dengan Jawa Tengah dan Nasional yang juga sama-sama mengalami peningkatan.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 4.4: Capaian IPM Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021

Pemerintah Kota Surakarta perlu terus mendorong peningkatan IPM. Peningkatan IPM merupakan hasil pencapaian pembangunan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian untuk jangka waktu yang panjang. Peningkatan IPM perlu diupayakan melalui

perubahan pola pikir manusia, yaitu perubahan untuk semakin berperilaku hidup bersih dan sehat (bidang kesehatan), peningkatan intelektual (bidang pendidikan) dan peningkatan kemampuan bersaing secara ekonomi (bidang ekonomi).

Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 82,26. Angka tersebut merupakan yang tertinggi nomor tiga di seluruh wilayah Jawa Tengah. Capaian tertinggi IPM di Jawa Tengah adalah di Kota Salatiga sebesar 83,6; Kota Semarang di peringkat kedua dengan indeks 83,55; dan Kota Surakarta menempati peringkat ketiga dengan indeks sebesar 82,26. Secara rinci terlihat pada gambar berikut



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 4.5: Posisi Capaian IPM Kota Surakarta Dibandingkan dengan Kab/Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2021

Gambaran indikator pembentuk IPM Kota Surakarta secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

a. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Kualitas kesehatan

masyarakat Kota Surakarta secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang. Capaian rata-rata angka harapan hidup penduduk di Kota Surakarta dalam kurun waktu 2017 - 2021 menunjukkan peningkatan. Dari tahun 2017 sebesar 77,03 tahun kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 77,22 tahun. Perkembangan angka harapan hidup kota Surakarta pada tahun 2016 - 2020 bisa dilihat pada gambar berikut :



Sumber: BPS Jawa tengah, 2022

Gambar 4.6: Angka Harapan Hidup Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021

Selanjutnya, angka harapan hidup Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 77,32 tahun diatas rata-rata Provinsi Jawa tengah (74,47 tahun) dan Nasional (71,57 tahun), dibandingkan dengan Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah Kota Surakarta menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kota Salatiga (77,55 tahun) dan Kota Semarang (77,51 Tahun). Perbandingan Angka harapan hidup Kota-kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 4.7 Perbandingan Angka Harapan Hidup Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

b. Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Capaian harapan lama sekolah di Kota Surakarta dalam kurun waktu 2016 - 2020 menunjukkan peningkatan. Dari sebesar 14,5 tahun pada tahun 2016 menjadi 14,87 tahun pada tahun 2020. Perkembangan harapan lama sekolah di Kota Surakarta selama 2016 - 2020 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Jawa Tengah , 2022

Gambar 4.8: Perkembangan Harapan Lama Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021

Capaian harapan lama sekolah di Kota Surakarta tahun 2021 sebesar 14,88 tahun, berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (12,77 tahun) dan Nasional (13,08 tahun). Dibandingkan di antara kota-kota di Provinsi Jawa Tengah, angka harapan hidup Kota Surakarta menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kota Semarang (15,53 tahun) dan Kota Salatiga (15,42 tahun). Perkembangan Angka harapan lama sekolah kota-kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 4.9: Harapan Lama Sekolah Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

c. Rata-Rata Lama Sekolah

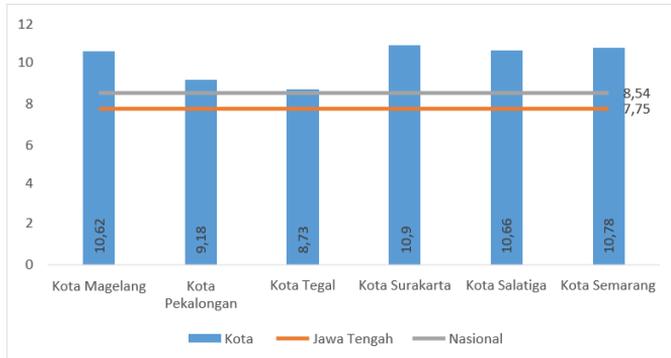
Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka rata-rata lama sekolah bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam Pendidikan Formal. Capaian rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta menunjukkan peningkatan. Dalam kurun waktu 2017 - 2021 capaian rata-rata lama sekolah meningkat dari 10,38 tahun pada tahun 2017 menjadi 10,9 tahun pada tahun 2021, Angka rata-rata lama sekolah Kota Surakarta selama kurun waktu 2017 - 2021 dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2022

Gambar 4.10: Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021

Posisi Rata-rata lama sekolah Kota Surakarta tahun 2021 sebesar 10,9 tahun, berada di atas rata-rata provinsi Jawa tengah (7,75 tahun) dan Nasional (8,54 tahun). Dibandingkan di antara kota-kota di Provinsi Jawa Tengah rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta menempati urutan tertinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2022

Gambar 4.11: Rata-Rata Lama Sekolah Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

d. Pengeluaran Per Kapita

Pengeluaran perkapita di Kota Surakarta mengalami kenaikan dari Rp.13.986 ribu pada tahun 2017 menjadi Rp.14.911 ribu pada tahun 2021. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran perkapita penduduk Kota Surakarta mengalami peningkatan. Perkembangan pengeluaran per kapita Kota Surakarta dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

Gambar 4.12: Perkembangan Pengeluaran per Kapita Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021

Posisi relatif pengeluaran per kapita Kota Surakarta tahun 2021 sebesar Rp. 14.911 ribu berada di atas Provinsi (Rp.11.156 ribu) dan Nasional (Rp.11.034 ribu). Capaian pengeluaran per kapita Kota Surakarta menempati posisi ketiga tertinggi setelah Kota Salatiga (Rp.15.843 ribu) dan Kota Semarang Rp.15.425 ribu. Rata-rata capaian pengeluaran per kapita tahun ini mengalami penurunan dari tahun 2021. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang telah mempengaruhi jumlah penghasilan masyarakat sehingga berpengaruh juga terhadap pengeluaran. Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2021

Gambar 4.13: Pengeluaran Per Kapita Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 (Ribu Rupiah)

2. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surakarta menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 2017 - 2021, dari sebesar 96,74 pada tahun 2017 menjadi sebesar 96,89 pada tahun 2021. Kondisi tersebut relevan dengan Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kota Surakarta tergolong baik. Secara rinci dapat dilihat di gambar dibawah ini :



Sumber: BPS Nasional, 2022

Gambar 4.14: Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 - 2021

Capaian IPG Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 96,89 berada diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (92,48) dan rata-rata Nasional (91,27) serta menempati urutan tertinggi dibanding Kota di Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2022

Gambar 4.15: Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2021

Indikator komposit IPG terdiri dari empat komponen yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Sumbangan Pendapatan. Dalam IPG, indikator komposit masing-masing nilai terpilah antara laki-laki dan perempuan untuk melihat tingkat kesenjangannya. Jika dilihat dari indikator angka harapan hidup maka dapat terlihat setiap tahunnya mengalami peningkatan. Selain itu, terlihat pula bahwa angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut dapat terlihat pada capaian angka harapan hidup perempuan pada tahun 2021 yang menunjukkan nilai 79,23 tahun sedangkan laki-laki hanya sebesar 75,57 tahun.

Kemudian, jika dilihat dari indikator harapan lama sekolah maka nilainya juga mengalami peningkatan. Jika dilihat dari perspektif gender maka terlihat bahwa harapan lama sekolah perempuan pada tahun 2021 lebih tinggi jika dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut cukup baik, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya harapan lama sekolah untuk perempuan cenderung lebih rendah.

Rata-rata lama sekolah di Kota Surakarta pada dasarnya sudah cukup baik yaitu 11,42 tahun untuk laki-laki dan 10,54 tahun untuk perempuan pada tahun 2021.

Kemudian untuk sumbangan pendapatan terlihat bahwa terjadi peningkatan sumbangan pendapatan baik pada laki-laki maupun perempuan. Jika dilihat dari perspektif gender, maka laki-laki masih menjadi penyumbang pendapatan yang lebih besar setiap tahunnya. Untuk melihat secara rinci capaian komposit IPG Kota Surakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.4:Perkembangan Indikator Komposit IPG Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021

No	Indikator	2017		2018		2019		2020		2021	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Angka Harapan Hidup (tahun)	75,26	78,96	75,31	79,01	75,32	70,02	75,45	79,12	75,57	79,23
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,42	14,57	14,43	14,58	14,47	14,59	14,77	14,93	14,78	14,94
3	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,96	9,84	11,09	10,01	11,10	10,09	11,25	10,30	11,42	10,54
4	Sumbangan Pendapatan (Rp)	14.093	12.963	14.673	13.493	15.229	13.783	14.932	13.504		

Sumber: BPS Nasional, 2022

3. Indeks Pemberdayaan Gender

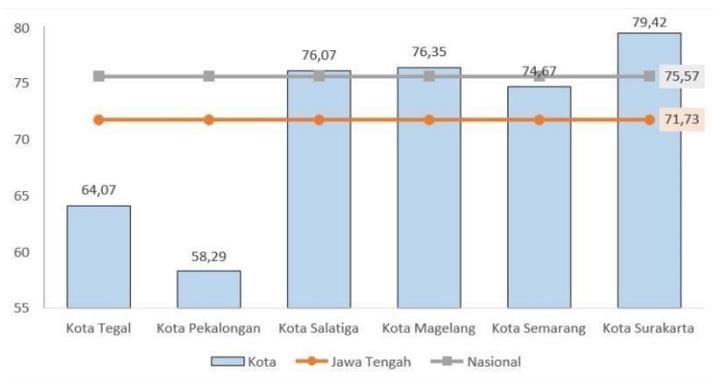
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 76 naik menjadi sebesar 79,42 pada tahun 2020. Hal ini sama dengan Nasional yang terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, sedangkan IDG Jawa Tengah mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung menurun di tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: BPS Nasional, 2020

Gambar 4.16: Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016 - 2020

Capaian IDG Kota Surakarta pada tahun 2020 sebesar 79,42, berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,73 dan Nasional sebesar 75,57. Jika dibandingkan dengan capaian Kota lainnya di Jawa Tengah, IDG Kota Surakarta menempati posisi teratas. Selengkapnya dapat dilihat di bawah ini:



Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 4.17: Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2020

IDG merupakan indikator yang dapat memperlihatkan peningkatan kualitas perempuan di suatu wilayah. Indikator komposit IDG terdiri dari keterlibatan perempuan di parlemen; Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi; dan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja. Keterlibatan perempuan di parlemen Kota Surakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami peningkatan dari sebesar 20% menjadi sebesar 22,22%. Kondisi tersebut berbeda dengan Jawa Tengah yang mengalami penurunan, yaitu dari 24% di tahun 2017 menjadi 18,80% di tahun 2020.

Dilihat dari indikator komposit Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kota Surakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 48,66% menjadi sebesar 51,06% di tahun 2020. Sedangkan dilihat dari indikator komposit Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja, Kota Surakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami perkembangan stagnan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 43,94% dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 44,07%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.5: Perkembangan Indikator Komposit IDG Kota Surakarta Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Keterlibatan perempuan di parlemen (%)	n/a	20,00	20,00	20,00	22,22
2	Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	n/a	48,66	45,06	50,89	51,06
3	Sumbangan Perempuan dalam	n/a	43,94	43,93	43,95	44,07

Pendapatan Kerja (%)						
-------------------------	--	--	--	--	--	--

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

B. Kondisi Kesejahteraan Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Penghitungan PDRB dilakukan atas dasar harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan atas dasar harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2021 mencapai Rp. 50 371 564,19. Secara nominal nilai PDRB ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp. 41.066.139,47. Naiknya nilai PDRB dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Surakarta pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp. 13.423.876,09 (mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017). Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 11.061.382,83, disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 7.486.879,25. Kontribusi kategori industri pengolahan sebesar Rp. 4.362.549,95. Berikutnya lapangan usaha jasa pendidikan sebesar Rp. 2.740.938,83. Salah satu sektor yang menyumbang PDRB Atas Dasar Harga Berlaku terendah tahun 2021 yaitu peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp. 253.396,56, salah satu penyebab utama adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut.

Tabel 4.6: Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2017-2021

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	204.257,51	219.181,71	233.444,75	243.528,14	253.396,56
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	203.425,54	218.303,02	232.506,07	242.559,89	
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	11,14	11,54	11,79	0,00	
	3. Perikanan	820,83	867,15	926,89	968,25	
B	Pertambangan dan Penggalian	800,26	821,67	796,04	281,60	243,11
C	Industri Pengolahan	3.478.887,13	3.748.201,87	4.060.311,37	4.024.918,64	4.362.549,95
Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
D	Pengadaan Listrik dan Gas	82.618,04	89.447,76	94.467,61	95.484,59	105.672,66
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	61.412,83	64.543,46	68.562,82	74.921,49	71.493,11
F	Konstruksi	10.967.643,65	12.059.892,39	13.011.418,38	12.883.929,92	13.423.876,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.211.200,08	9.840.818,19	10.635.516,54	10.306.413,83	11.061.382,83
H	Transportasi dan Pergudangan	1.118.656,74	1.133.736,50	1.241.375,56	488.770,97	524.376,11

I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.402.558,56	2.443.524,86	2.596.798,29	2.179.997,16	2.379.346,01
J	Informasi dan Komunikasi	4.553.522,76	5.182.973,52	5.764.427,29	6.929.679,08	7.486.879,25
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.598.052,78	1.704.370,50	1.805.302,07	1.856.884,85	1.968.240,07
L	Real Estate	1.673.192,64	1.760.865,00	1.846.239,69	1.890.733,35	1.974.896,20
M,N	Jasa Perusahaan	328.367,83	372.415,59	414.236,87	387.892,84	402.026,46
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.350.648,03	2.459.805,65	2.594.387,03	2.567.427,62	2.574.052,99
P	Jasa Pendidikan	2.191.776,48	2.425.953,87	2.643.711,13	2.688.467,54	2.740.938,83
Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	454.831,32	499.078,89	535.372,96	622.766,87	635.796,69
R,S,T,U	Jasa lainnya	387.712,83	422.259,08	456.680,62	402.465,17	406.397,27
	Produk Domestik Regional Bruto	41.066.139,47	44.427.890,52	48.003.049,02	47.644.563,66	50371564,19

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2022

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2020 juga mengalami kenaikan dari sebesar Rp. 31.562.980,46 pada tahun 2017 dan mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 36.211.248,26 pada tahun 2021. Tiga Sektor penyumbang terbesar adalah lapangan usaha konstruksi yaitu mencapai Rp. 8.971.026,38. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp. 8.227.240,68, diikuti oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar Rp. 6.951.672,31.

Dari prosentase pertumbuhan, tiga sektor dengan laju tertinggi yaitu sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 19,7% dan lapangan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 12,11%. Kenaikan PDRB ADHK 2010 ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi. Kesimpulan ini didukung oleh data yang disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.7: Produk Domestik Regional Bruto Kota Surakarta Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), Tahun 2017 - 2021

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	136.489,99	141.924,28	146.196,14	149.001,94	152191,74
	1. Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	135.942,92	141.370,39	145.631,54	148.441,22	
	2. Kehutanan dan Penebangan Kayu	7,41	7,43	7,38	0,00	
	3. Perikanan	539,65	546,46	557,22	560,72	
B	Pertambangan dan Penggalian	530,74	522,35	510,76	174,08	148,36
C	Industri Pengolahan	2.446.405,47	2.551.984,70	2.707.251,45	2.598.563,54	2.757.755,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	72.109,52	75.706,00	79.648,25	80.921,82	86.460,08
E	Pengadan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	53.518,10	56.315,73	58.986,31	60.886,07	58.270,83
F	Konstruksi	8.255.938,7	8.693.085,2	9.090.505,96	8.913.264,9	8.971.026,

		5	6		5	38
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.415.193,59	7.800.993,15	8.205.089,06	7.779.824,28	8.227.240,68
H	Transportasi dan Pergudangan	908.893,25	960.615,10	1.030.897,73	384.648,82	399.568,57
I	Penyediaan Akomodasi Dan Makan Minum	16.053.085,59	1.672.613,64	1.759.781,79	1.483.953,24	1.599.051,16
J	Informasi dan Komunikasi	4.302.733,75	4.897.768,51	5.393.512,88	6.455.883,90	6.951.672,31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.091.006,81	1.131.379,74	1.181.579,42	1.206.749,40	1.234.323,51
L	Real Estate	1.397.574,02	1.433.835,71	1.476.560,66	1.482.893,04	1.533.565,90
M,N	Jasa Perusahaan	233.751,42	256.239,26	280.665,53	256.718,39	262.333,82
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.682.112,54	1.732.862,82	1.800.423,00	1.761.678,74	1.758.276,59

Kategori	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
P	Jasa Pendidikan	1.326.726,85	1.411.139,38	1.495.586,53	1.481.236,98	1.483.178,66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	326.332,40	357.001,84	379.101,04	425.010,18	430.202,70
R,S,T,U	Jasa lainnya	308.354,68	332.182,93	356.884,83	305.778,92	305.981,96
	Produk Domestik Regional Bruto	31.562.980,46	33.506.170,40	35.443.181,34	34.827.188,29	36.211.248,26

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2022

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2019 selalu mengalami trend meningkat, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19 menjadi $-1,74\%$. Kondisi ini selaras dengan nasional namun berbeda dengan Provinsi Jawa tengah yang perkembangannya bergerak fluktuatif. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar $4,01$ pada Kota Surakarta. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Sumber : BPS Provisini Jawa Tengah, 2021

Gambar 4.18: Perbandingan realisasi dan target Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta tahun 2017 – 2021 dan Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 – 2021

Jika dilihat berdasarkan target pertumbuhan ekonomi yang di tetapkan dalam RPJMD Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021, realisasi pencapaiannya selama kurun waktu tahun 2017 telah mencapai target yang ditentukan dan tahun 2018 - 2020 belum mencapai target yang ditentukan. Analisis penyebab hambatan pencapaian target disebabkan oleh pandemi covid-19 di tahun 2020 yang berdampak pada merosotnya aktivitas perekonomian di Kota Surakarta.

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kota-kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta menempati posisi kedua tertinggi setelah Kota Semarang (5,16%). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini



Sumber : BPS Provisini Jawa Tengah, 2022

Gambar 4.19: Posisi relatif Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Kota Sekitar, Nasional dan Prov Jawa Tengah tahun 2021

1. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

PDRB Perkapita Kota Surakarta dalam kurun waktu 2017 hingga tahun 2021 mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2017 tercatat sebesar Rp. 79.670 ribu rupiah, secara terus menerus mengalami kenaikan hingga tahun 2021

sebesar Rp. 96.360 ribu rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita menurut ADHB yang cukup tinggi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perkembangan teknologi informasi yang memacu kemudahan transportasi dan jasa perdagangan *online*, dan jasa lainnya. Selain itu, faktor inflasi juga berkontribusi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



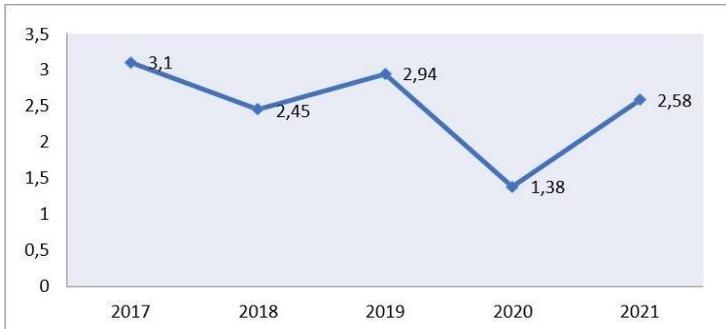
Sumber : BPS Kota Surakarta, Buku Kota Surakarta Dalam Angka 2022 (diolah)

Gambar 4.20: Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021

2. Laju Inflasi

Inflasi adalah meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Dampak dari inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa.

Perkembangan Laju inflasi di Kota Surakarta dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan capaian yang positif yaitu pada tahun 2021 laju inflasi Kota Surakarta sebesar 2,58% meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 2,94%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Sumber: BPS Kota Surakarta, 2022

Gambar 4.21: Laju Inflasi di Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021

BAB V

KEMISKINAN KOTA SURAKARTA

A. Garis Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis Kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan, di mana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) tingkat Provinsi Jawa Tengah, peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Pada September 2020, komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK baik di perkotaan maupun di perdesaan pada umumnya hampir sama (lihat Tabel 2.18). Beras memberi sumbangan sebesar 16,59 persen di perkotaan dan 18,61 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (13,95 persen di perkotaan dan 10,66 persen di

perdesaan). Komoditi lainnya adalah telur ayam ras (4,04 persen di perkotaan dan 4,34 persen di perdesaan), daging ayam ras (3,74 persen di perkotaan dan 3,65 persen di perdesaan), gula pasir (2,98 persen di perkotaan dan 3,15 persen di perdesaan) dan seterusnya. Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar baik pada GK perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Beberapa komoditi makanan dan bukan makanan yang dapat berpengaruh terhadap kenaikan garis kemiskinan, sebagai berikut :

1. Komoditi Makanan

Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di daerah perkotaan maupun perdesaan pada September 2020 adalah beras dan rokok kretek filter, untuk lebih lengkapnya ditunjukkan pada dibawah ini.

Tabel 4.8: Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Pengaruh Besar terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode September 2020

No	Komoditi	Kota (%)	Komoditi	Desa (%)
1	Beras	16,59	Beras	18,61
2	Rokok kretek filter	13,95	Rokok kretek filter	10,66
3	Telur Ayam Ras	4,04	Telur ayam ras	4,34
4	Daging ayam ras	3,74	Daging ayam ras	3,65
5	Gula pasir	3,00	Gula pasir	2,90
6	Mie instan	2,33	Tempe	2,81
7	Tempe	2,25	Mie instan	2,72
No	Komoditi	Kota (%)	Komoditi	Desa (%)
8	Kue basah	2,18	Tahu	2,39
9	Tahu	2,17	Kue basah	2,37
10	Roti	1,96	Bawang Merah	2,26
11	Lainnya	21,35	Lainnya	22,74

Sumber: BPS, Berita resmi statistik kemiskinan, 2021

2. Komoditi Bukan Makanan

Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar baik pada GK perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi. Secara rinci ditunjukkan pada tabel berikut ini.

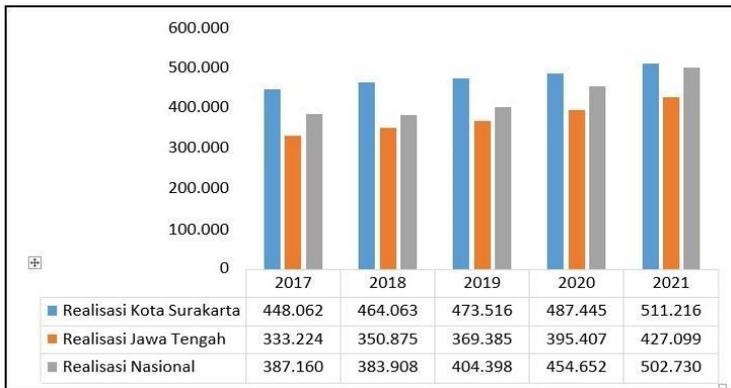
Tabel 4.9: Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Berpengaruh Besar Terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode Maret 2020

No	Komoditi	Kota (%)	Komoditi	Desa (%)
1	Perumahan	6,85	Perumahan	6,85
2	Bensin	4,03	Bensin	3,25
3	Listrik	2,61	Listrik	1,65
4	Pendidikan	1,80	Pendidikan	1,35
5	Perlengkapan mandi	1,46	Perlengkapan mandi	1,23
6	Lainnya	9,69	Lainnya	10,23

Sumber: Berita resmi statistik kemiskinan, BPS 2021

Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah, tidak terkecuali juga bagi Pemerintah Kota Surakarta. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta diharapkan dapat terus menekan angka kemiskinan sampai pada tingkat yang serendah-rendahnya. Penurunan angka kemiskinan dipengaruhi juga oleh besaran Garis Kemiskinan yang menjadi klasifikasi seseorang termasuk pada kategori miskin atau tidak miskin. Garis Kemiskinan di Kota Surakarta memiliki kecenderungan kenaikan yang besar dalam lima tahun terakhir (2017-2021), dengan kenaikan mencapai Rp.57.152. Tingkat kenaikan yang cukup tinggi setiap tahunnya cukup berpengaruh terhadap ukuran pengeluaran penduduk miskin jika tidak diimbangi dengan peningkatan

rata-rata pendapatan penduduk miskin. Jika melihat besaran garis kemiskinan di Kota Surakarta ditahun 2021 sebesar Rp. 511.216 lebih tinggi jika dibandingkan dengan besaran garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.427.099 dan Nasional Rp 502.730.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

Gambar 4.22: Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Surakarta Tahun 2017 - 2021 (Rupiah/Kapita/Bulan)

Ukuran garis kemiskinan Kota Surakarta sebesar Rp. 511.216 ditahun 2021. Jika dialihkan menggunakan nilai garis kemiskinan yang digunakan Bank Dunia, yang mengklasifikasikan persentase penduduk Indonesia yang hidup dengan penghasilan kurang dari USD \$1.25 per hari sebagai mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, persentase penduduk yang ada di bawah garis kemiskinan akan lebih besar lagi. Dengan demikian akan terlihat bahwa masih banyak penduduk di Kota Surakarta hidup hampir di bawah garis kemiskinan.

Ukuran garis kemiskinan di Kota Surakarta jika dibandingkan dengan Kota sekitar angkanya kategori tinggi. Garis kemiskinan Kota Surakarta sebesar Rp. 511.216 relatif tinggi jika dibandingkan dengan kota lainnya. Kota Surakarta menempati posisi keempat tertinggi setelah Kota Semarang

sebesar Rp. 543.929, Kota Magelang sebesar Rp. 537.783 dan Kota Tegal sebesar Rp 523.413. Perbandingan garis kemiskinan Kota Surakarta dengan daerah sekitar selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

Gambar 4.23: Perbandingan Garis Kemiskinan Kota-Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021

B. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin di Kota Surakarta kondisinya selalu menurun dari tahun ke tahun pada periode lima tahun terakhir (2017- 2021), pada tahun 2017 persentase penduduk miskin di Kota Surakarta mencapai 8,99%, pada tahun 2021 persentase penduduk miskin berhasil diturunkan hingga 8,62%. Hal tersebut berarti berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan cukup berhasil.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

Gambar 4.24: Perbandingan realisasi dan target Persentase Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2016–2020 dan Perkembangan Persentase

Penduduk Miskin Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017–2021 Persentase kemiskinan Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 9.4%, menjadikan persentase kemiskinan Kota Surakarta tertinggi diantara kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Namun masih rendah dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,79% dan Nasional sebesar 10,14%. Ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan Kota Surakarta masih dirasa kurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

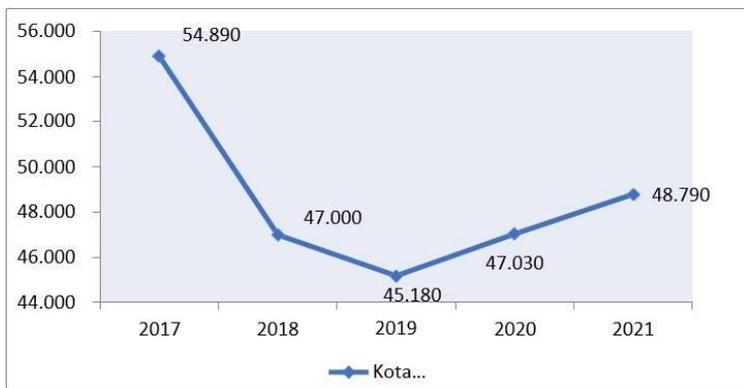


Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

Gambar 4.25: Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2021

C. Jumlah Penduduk Miskin

Perkembangan jumlah penduduk miskin Kota Surakarta pada tahun 2017 hingga tahun 2021, terus mengalami penurunan. Jumlah penduduk miskin Kota Surakarta tahun 2017 sebesar 54.890 jiwa menurun sampai dengan tahun 2019 menjadi sebesar 45.180 jiwa, tetapi pada tahun 2020 terkoreksi kembali menjadi 47.030 jiwa akibat Pandemi COVID 19. Kembali meningkat kembali pada tahun 2021 yaitu sebesar 48,790. Perkembangan jumlah penduduk miskin dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

Gambar 4.26: Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2017-2021 (Jiwa)

BAB VI INDEKS KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI KOTA SURAKARTA

A. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan

1. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan di Kota Surakarta pada tahun 2017 sebesar 1,87, kemudian pada tahun 2018 kembali turun menjadi 1,47 lalu pada tahun 2019 meningkat kembali pada angka 1,60, dan pada tahun 2020 turun menjadi 1,51. Pada tahun 2021 naik pada angka 1,83, kondisi pergerakan indeks kedalaman kemiskinan di Kota Surakarta dapat dilihat pada di bawah ini.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

Gambar 4.27: Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Surakarta Tahun 2017-2021

Indeks kedalaman kemiskinan Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 1,83 termasuk dalam kelompok indeks kedalaman kemiskinan tertinggi diantara kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Namun berada dibawah rata-rata Jawa Tengah sebesar 1,94 dan Nasional sebesar 1,67. Hal

tersebut mengindikasikan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan masih tinggi.



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2022

Gambar 4.28: Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Surakarta, Kota lainnya, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021

2. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan satuan indeks yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2017-2021) di Kota Surakarta menunjukkan tren fluktuasi, yaitu sebesar 0,44 pada tahun 2017 dan turun kembali menjadi 0,35 di tahun 2018 kemudian naik kembali menjadi 0,48 lalu turun kembali menjadi 0,38 di tahun 2020 dan naik kembali menjadi 0,54 pada tahun 2021. Perkembangan indeks keparahan kemiskinan Kota Surakarta pada tahun terakhir mengalami penurunan, berbeda dengan Jawa Tengah dan Nasional yang mengalami kenaikan. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber :BPS Jawa Tengah, 2022

Gambar 4.29: Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surakarta Tahun 2017 – 2021

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surakarta pada tahun 2021 sebesar 0,54 menempati posisi tertinggi bila dibandingkan dengan Kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, dan berada di atas rata-rata Jawa Tengah sebesar 0,46 dan namun di bawah rata-rata Nasional sebesar 0,42. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber :BPS Kota Surakarta, 2022

Gambar 4.30: Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Surakarta dengan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2021

B. Tingkat Pengangguran Teerbuka dan Partisipasi Angkatan Kerja

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kota Surakarta dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Surakarta menunjukkan penurunan pada tahun 2017 sampai 2019 yaitu dari 4,57% menurun menjadi 4,49%. Namun di tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar 7,92%. Pada tahun 2021 cukup sedikit mengalami penurunan pada angka 7,85%. Hal ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak perusahaan yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau mengurangi jumlah karyawannya bahkan melakukan pemotongan gaji karyawan. Timbulnya gelombang PHK ini tentu saja menambah jumlah pengangguran yang ada. Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan karena banyak perusahaan yang berusaha tetap bertahan dengan jumlah karyawan yang ada. Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa TPT Kota Surakarta, TPT Provinsi Jawa Tengah dan Nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2020.



Sumber : Berita resmi statistik ketenagakerjaan, BPS 2021

Gambar 4.31: Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 - 2021 (%)

Dengan kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2021 sebesar 7,85%, Kota Surakarta berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (5,95%) dan berada di bawah Nasional (6,49%) serta terendah keempat diantara kota lainnya. Kondisi tingkat pengangguran terbuka Kota Surakarta tahun 2021 menunjukkan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja ataupun dengan kondisi tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 7 - 8 orang merupakan pengangguran.



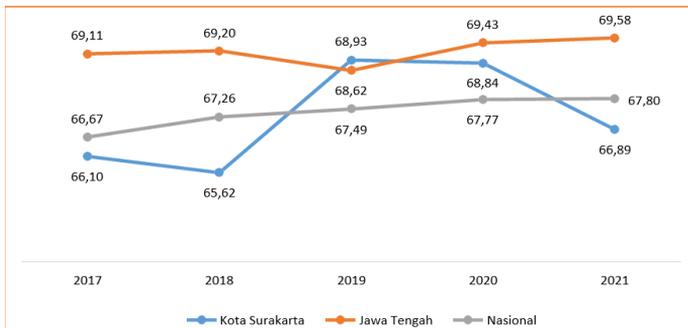
Sumber: Berita resmi statistik ketenagakerjaan, BPS 2022

Gambar 4.32: Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2021 (%)

Kota Surakarta yang merupakan kota dengan pertumbuhan ekonominya sebagian besar adalah pada sektor perdagangan, jasa dan industri menjadikan salah satu daya tarik untuk mencari pekerjaan bagi para pencari kerja. Masyarakat di luar Kota Surakarta terutama pada para pencari kerja usia muda yang kategori baru lulusan pendidikan akan mencari pekerjaan pada sektor-sektor modern. Banyaknya angkatan kerja bukan penduduk Kota Surakarta yang datang dan kemudian berdomisili di Kota Surakarta untuk mencari pekerjaan menjadi tantangan tersendiri. Ketersediaan angkatan kerja yang dibutuhkan pasar memiliki pengaruh terhadap penyerapan jumlah angkatan kerja. Sementara jumlah angkatan kerja yang datang dari luar Kota Surakarta menjadi pesaing besar bagi angkatan kerja lokal untuk mendapatkan pekerjaan yang tersedia. Dengan kondisi tersebut, naik turunnya tingkat pengangguran terbuka di Kota Surakarta dapat dipengaruhi oleh tingkat serapan angkatan kerja dalam dunia kerja yang besarnya dipengaruhi oleh persaingan antara angkatan kerja lokal dengan luar Kota Surakarta.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Perkembangan angkatan kerja di Kota Surakarta pada tahun 2017 mengalami fluktuatif cenderung naik dan turun hingga tahun 2021 dari angka 66,10% pada tahun 2017 menjadi 65,62% pada tahun 2018, kemudian kembali mengalami kenaikan pada tahun 2020, yaitu 68,84% lalu turun kembali ke angka 66,89% pada tahun 2021. Kondisi tersebut tidak relevan dengan Nasional yang mengalami kenaikan pada tahun 2019, sedangkan Jawa Tengah bergerak fluktuatif. Selengkapnya perkembangan TPAK Kota Surakarta dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2017 hingga 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Sumber : Berita resmi statistik ketenagakerjaan, BPS 2022
Gambar 4.33: Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 - 2021 (%)

Dengan kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 69,41%, Kota Surakarta berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (69,58%). Dibandingkan dengan kota lainnya di Jawa Tengah TPAK Kota Surakarta tahun 2021 berada di posisi terendah kedua setelah Kota Magelang sebesar 67,07%. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Sumber : Berita resmi statistik ketenagakerjaan, BPS 2022

Gambar 4.34: Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Surakarta dan Kota Lainnya di Jawa Tengah Tahun 2021 (%)

BAB VII

MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN SEBAGAI KEPALA KELUARGA

A. Perempuan Kepala Keluarga Miskin

Teori kemiskinan ini menegaskan bahwa individu bertanggung jawab atas situasi kemiskinan mereka sendiri. Faktor individu yang memicu kemiskinan adalah sikap, modal manusia, dan partisipasi dalam mencapai kesejahteraan. Kemiskinan disebabkan oleh kurangnya kualitas genetik seperti kecerdasan. Teori yang didasarkan pada premis nilai-nilai dan kepercayaan Amerika menekankan bahwa bakat, kebajikan, dan kerja keras dapat membawa kesuksesan dan kemiskinan individu adalah kegagalan individu karena kurangnya motivasi (Addae-Korankye 2019). Teori ini dibantah, karena kemiskinan juga dapat dipicu oleh lingkungan.

E Philip Davis and Miguel Sanchez memandang teori kemiskinan individu merupakan teori klasik. Teori neoklasik lebih luas mengenali alasan kemiskinan di luar pemahaman individu seperti kurangnya aset sosial dan pribadi; kegagalan pasar yang mengecualikan orang miskin dari pasar kredit, Pendidikan yang rendah; imigran status; kesehatan yang buruk dan usia lanjut; dan hambatan pekerjaan bagi keluarga dengan orang tua tunggal (Davis and Sanchez-Martinez 2015). Mengukur kemiskinan juga dilihat dari budaya kemiskinan.

Budaya kemiskinan berangkat dari kondisi terisolasi, esensial, statis, dan patologis, secara otonom menentukan perilaku, dan mendorong aktivitas disfungsi. Lingkungan berpenghasilan rendah menjadi fokus sebagai situs bahaya, terputus dari masyarakat arus utama, di mana kekerasan melekat tidak hanya pada ruang itu sendiri, tetapi juga pada orang-orang yang tinggal pada wilayah tersebut (Lopez and Stack 2017).

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Kemiskinan juga dipandang dalam perspektif gender. Kemiskinan pada perempuan yang menjadi kepala keluarga.



Gambar 4.35: Distribusi Pendidikan Responden

Sebagian besar responden yang menjadi obyek kajian memiliki tingkat pendidikan yang baik, hampir separuh dari responden memiliki pendidikan SMA/MA/SMK sebesar 31,71%, Pendidikan D3-D4 sebesar 7,32% dan S1 sebesar 2,44%. Lainnya merupakan responden dengan tingkat pendidikan setingkat SMP/MTs kebawah bahkan terdapat responden yang tidak lulus SD sebesar 9,76%.

Tingkat pendidikan responden memiliki pengaruh yang besar terhadap jenis pekerjaan yang digeluti oleh responden. Semakin tinggi jenjang pendidikan responden maka jenis pekerjaan yang dimiliki lebih baik dibandingkan dengan

responden dengan jenjang pendidikan dibawahnya. Ibu AF yang memiliki tingkat pendidikan D4 memiliki pekerjaan sebagai staff admin perusahaan yang mampu memberikan kepastian terhadap pendapatan bulanan keluarga. Ibu AFS yang memiliki tingkat pendidikan S1 memiliki pekerjaan sebagai pemiliki toko daring yang digeluti dalam jangka waktu 1 tahun terakhir. Ibu PNM yang tidak lulus SD bekerja sebagai tukang bersih kubur, Ibu SDY dan DRB yang juga tidak lulus SD bekerja sebagai asisten rumah tangga. Distribusi pendidikan responden secara rinci dapat dilihat pada grafik diatas.

Responden yang bekerja sebagi wiraswasta dan pedagang hampir setengahnya tidak memiliki modal. Hanya terdapat 51,22% responden yang memiliki modal. Besar modal bervariasi antara Rp 300.000 hingga Rp 180.000.000. Ibu SWD mengagunkan rumah yang menjadi aset satu-satunya dimiliki untuk membuka sebuah toko kelontong dan warung makan. Hal ini disebabkan oleh tingginya nominal biaya yang harus ditanggung oleh responden setiap bulan. Pengeluaran yang dahulu ditanggung oleh suami saat ini harus ditanggung oleh Ibu SWD. Ibu RWT mengakses permodalan melalui Bank Plecit atau koperasi yang dibayar harian sebesar Rp 4.000.000.



Gambar 4.36: Distribusi Pekerjaan Responden

Status perkawinan merupakan sebuah status terhadap perkawinan dari seseorang dimana menurut Sistem Rujukan Statistik BPS dikategorikan kedalam 4 (empat) kategori, yaitu belum kawin, kawin, cerai mati, dan cerai talak. Kendati secara normatif terdapat 4 (empat) jenis, pada prakteknya sering terjadi diskursus terhadap status perkawinan seseorang akibat dari adanya 2 (dua) sumber hukum di Indonesia, yaitu hukum negara dan hukum agama. Menurut hukum agama, apabila seorang suami memenuhi unsur sebagaimana tersebut dalam Sighat Taklik Talak maka secara agama sudah menjatuhkan talak kepada istri, akan tetapi seringkali istri sebagai pihak yang ditalak tidak menindaklanjuti kepada Pengadilan Agama sehingga menyebabkan munculnya satu status baru dalam tataran implementasi yaitu “perkawinan tanpa kejelasan status”. Terdapat 4,88% responden yang mengalami kondisi tersebut dimana dalam prakteknya suami telah meninggalkan keluarga dalam kurun waktu puluhan tahun tanpa adanya nafkah batin maupun lahir kepada istri dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Perkawinan tanpa kejelasan status juga dapat diartikan sebagai sebuah hubungan keluarga tanpa adanya pernikahan, baik pernikahan agama maupun negara.

Penyebab terjadinya perceraian menurut responden disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya adalah perselisihan dan kondisi ekonomi. Perselisihan terjadi akibat tidak adanya komunikasi yang harmonis diantara suami dan istri. Perselisihan tidak jarang juga menyebabkan terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana pengakuan dari 45,23% responden. Kekerasan yang dialami juga tidak hanya sebatas kekerasan dalam bentuk fisik dan verbal akan tetapi juga dalam bentuk kekerasan seksual. Penyebab lain dari perceraian adalah faktor ekonomi dan/atau kombinasi dari kedua faktor diatas yaitu faktor ekonomi dan kekerasan. Dari faktor ekonomi suami tidak mampu memberikan nafkah secara baik atau bahkan cenderung tidak bekerja dan mengandalkan nafkah dari isteri.



Gambar 4.37: Distribusi Kepemilikan Modal Usaha Responden

Identitas hukum adalah dokumen yang berisi tentang informasi terkait dengan seseorang Identitas hukum berguna untuk memberikan informasi tentang kondisi dan status dari seseorang baik dari sisi pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil. Kepemilikan dokumen identitas hukum merupakan hak mendasar yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat memberikan kesejahteraan dan pembangunan sosial perempuan. Dokumen identitas hukum yang perlu dimiliki oleh responden adalah Akta Cerai (bagi yang telah bercerai) dan KK dengan status responden sebagai janda dan beralih menjadi kepala keluarga. Akta cerai merupakan identitas hukum paling penting untuk menunjukkan status perkawinan responden.

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Upah Minimum merupakan hal yang penting ddalam rangka memenuhi standar hidup layak dari pekerja. UMK juga dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan apakah seseorang telah mencapai pendapatan yang layak. UMK Kota Surakarta pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 2.013.810, jika dikonversikan per hari adalah sebesar Rp 67.100. Berdasarkan hasil wawancara kepada responden menunjukkan bahwa hanya terdapat 24,39% responden yang menyatakan pendapatannya telah diatas UMK Kota Surakarta. Sebanyak 75,61% lainnya

belum sesuai dengan UMK bahkan sebagian besar berada jauh dibawah standar UMK tersebut.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa fisik yang dimiliki masih dalam kondisi yang baik terlihat dari jawaban atas penyakit ringan (60,98%) dan tidak pernah sakit menjadi jawaban mayoritas responden (14,63%). Penyakit ringan yang diderita oleh responden antara lain flu, batuk, sakit kepala, demam, dan masuk angin. Terdapat 19,51% responden yang mengalami penyakit dalam berupa diabetes, penyakit jantung, radang paru-paru, dan penyakit lambung.

Pola perilaku responden dalam mengobati penyakit yang diderita sudah cukup baik, terlihat dari metode pengobatan yang mayoritas dilakukan oleh responden adalah melalui akses terhadap fasilitas layanan kesehatan, baik Puskesmas, (65,85%) maupun Rumah Sakit (7,32%). Seluruh responden yang melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit dan Puskesmas merupakan pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kendati sebagian besar telah sadar akan pentingnya menjaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan, masih terdapat 2,44% responden yang mencoba untuk mengobati sakitnya melalui perantara dukun/tukang pijat.

Hubungan sosial merupakan sebuah interaksi sosial yang dapat berbentuk komunikasi dan interaksi. Hubungan sosial sangat penting dalam kehidupan manusia karena dalam sosial tersebut ada berbagai sarana yaitu sarana komunikasi, sarana informasi, sarana interaksi di masyarakat. Sebagian besar responden menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari selalu berinteraksi dan terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal. Sebanyak 68,29% responden menyatakan bahwa mereka terlibat aktif dalam setiap kegiatan kemasyarakatan berupa PKK dan Dasawisma.

Dalam interaksi sosial dibutuhkan juga ketrampilan social individu. Keterampilan sosial mendukung keberhasilan hubungan sosial dan memungkinkan seseorang bekerja sama dengan orang lain secara efektif. Keterampilan sosial merupakan sarana untuk memperoleh hubungan yang baik dalam

berinteraksi dengan orang lain, seperti membantu orang lain, bekerja sama, mengambil keputusan, berkomunikasi, melestarikan lingkungan, berwirausaha, dan berpartisipasi dalam masyarakat.

Keterampilan sosial yang perlu dimiliki siswa dalam berinteraksi dengan orang lain meliputi (1) Hidup dan bekerja sama; bergiliran, menghormati hak orang lain; peka sosial (kerja sama, toleransi, menghormati hak orang lain, dan memiliki kepekaan sosial); (2) Belajar pengendalian diri dan pengarahan diri (memiliki pengendalian diri); (3) Berbagi ide dan pengalaman dengan orang lain (berbagi pendapat dan pengalaman dengan orang lain). Melalui keterampilan sosial tersebut, individu akan lebih optimal dalam mengaktualisasikan diri, memaksimalkan potensi yang dimiliki, mengungkapkan perasaan dan masalah yang dihadapi, serta mendapatkan solusi yang masuk akal (Indriyani 2021).

Masyarakat secara umum memperlakukan responden secara baik, terlihat dari jawaban responden sebesar 95,12% menyatakan warga tidak pernah melakukan penolakan atau meminggirkan responden. Dalam berbagai kesempatan warga justru memberikan kesempatan responden untuk bergabung dan diterima dengan baik. Hanya terdapat 4,88 responden yang menyatakan menerima sikap kurang baik dari lingkungan sekitar. Ini merupakan dampak dari proses interaksi sosial yang mampu dijalankan oleh perempuan KK Miskin.

Strategi interaksi sosial dimulai dari tujuan, bertransisi menjadi satu kesatuan sosialnya. Proses dalam interaksi social dilalui dengan membangun keterampilan berinteraksi dengan kohesi kelompok. Selama proses interaksi harus aktif dan membangun kompromi, negosiasi, dan motivasi digunakan selama proses. Model interaksi sosial memiliki beberapa kelemahan penting. Proses interaksi sosial memakan waktu. Proses interaksi sosial harus dibangun dengan kesadaran untuk mendapatkan hasil yang optimal (Bhavin H and C M Shah BEd 2013).

Kendati sebagian besar diterima dengan baik oleh warga, terdapat 26,83% responden yang pernah mendapatkan labelling terhadap status janda yang dimiliki responden. Labelling tersebut berupa penyebutan sebagai “janda genit” ataupun dengan sebutan yang lain. Ibu LSD menyatakan kendati sebelum bercerai telah berdandan, ketika dirinya menjadi KRT perempuan penyebutan sebagai janda seger dan sebagainya mulai berdatangan. Ungkapan tersebut tidak hanya diberikan dari pembeli yang datang akan tetapi juga tetangga. Bahkan salah seorang pengurus RT pernah dengan terang-terangan mengemukakan labelling tersebut di depan banyak orang. Hal ini kendati masih bisa ditolerir oleh responden akan tetapi cukup mengganggu. Responden tidak pernah mempermasalahkan hal tersebut dan menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang merupakan bentuk perhatian kepada responden.

Salah satu kesulitan bagi responden pada saat bekerja adalah ketika memiliki anak kecil. Anak dalam kondisi bagaimanapun harus tetap mendapatkan pengasuhan baik yang dilakukan sendiri oleh orang tua maupun oleh pihak lain. Sebagian besar responden menyatakan bahwa pengasuhan anak dilakukan oleh pihak keluarga (46,34%) seperti kakek, nenek, kakak, adek, keponakan dan sebagainya sedangkan 17,07% lainnya diasuh sendiri karena pekerjaan yang dilakukan masih sangat mungkin untuk dilakukan dirumah atau membawa anak ke tempat kerja.

Hampir separuh dari responden menyatakan pernah menerima Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). KDRT menurut UU 23 Tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Efek fisik dari semua bentuk kekerasan tidak terbatas pada trauma fisik yang jelas tapi termasuk konsekuensi psikologis yang luas yang dapat mengakibatkan kekerasan berikutnya diarahkan pada diri sendiri atau orang lain. Sedangkan efek usia adalah jelas penting, efek kekerasan akut dan jangka panjang telah ditemukan di semua tahap hidup. Korban kekerasan sering terjadi mempertahankan berbagai bentuk. Anak yang dianiaya lebih cenderung menjadi korban pasangan intim kekerasan baik sebagai remaja maupun sebagai orang dewasa. Bahkan orang yang hidup dalam kemiskinan lebih mungkin terkena kekerasan di komunitas mereka dan menjadi korban langsung kekerasan. Efek kesehatan dari berbagai bentuk kekerasan ini, yang terjadi di umur yang berbeda, dapat bersifat kumulatif (Rivara et al. 2019).

Kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga telah dinyatakan sebagai masalah negara. Pemerintah Indonesia memperkenalkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai respon pemerintah melalui pendekatan hukum pidana dalam menangani kekerasan yang dilakukan dalam rumah tangga.¹³ Undang-undang tersebut telah memenuhi kebutuhan akan undang-undang khusus yang mempidanakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.¹⁴ Lahirnya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan hasil ratifikasi Konvensi CEDAW dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Selain itu, lahirnya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi tonggak perlindungan bagi mereka yang menjadi korban kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga di Indonesia (Mahfud and Rizanizarli 2021).

Jenis KDRT yang dialami oleh responden yang menyatakan pernah menerima KDRT berupa kekerasan fisik (5,88%), verbal (41,18%) dan keduanya (52,94%). Kekerasan fisik yang jamak diterima oleh responden antara lain pemukulan,

baik menggunakan tangan maupun menggunakan alat seperti sapu, piring, dan kayu serta kekerasan seksual seperti pemaksaan untuk berhubungan seksual dengan perilaku menyimpang. Ibu MSL menyatakan pernah dipukul menggunakan tangan di bagian pelipis mata yang sempat menyebabkan terjadinya pecah pembuluh darah mata hingga pingsan. Permasalahan tersebut sempat membuat mendapatkan perhatian dari lingkungan tempat tinggal akan tetapi karena pola pikir masyarakat yang terbentuk menyatakan KDRT adalah permasalahan domestik rumah tangga kemudian menjadikan kasus ini mereda dengan sendirinya.

Selain menjadi korban KDRT, sebanyak 19,51% responden juga mengakui bahwa pernah melakukan tindakan KDRT kepada anak. Tindakan KDRT tersebut seluruhnya dilakukan kepada anak berupa bentakan dan hardikan (verbal). Anak mendapatkan kekerasan verbal disebabkan oleh pola perilaku anak yang tidak dapat dikontrol, membantah dan/atau mengabaikan perintah orang tua. Ibu LSD melakukan tindakan KDRT kepada anak setelah anak tidak pulang kerumah hingga beberapa hari. Hal ini terjadi semenjak perceraian yang dialami oleh kedua orang tua. Ibu LSD juga menjelaskan bahwa anak mengalami perubahan sikap yang sangat signifikan setelah terjadi perceraian tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan merusak fisik dan mental serta penelantaran di antara anggota keluarga; itu mungkin termasuk pasangan, anak-anak, kerabat dan siapa pun yang bergantung pada rumah tangga yang sama. Masalah kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi orang-orang dari semua jenis kelamin, usia, dan kelas, serta berdampak besar pada kebahagiaan anggota keluarga, terutama bagi anak-anak, yang merupakan urutan kedua yang paling terpengaruh oleh kekerasan dalam rumah tangga setelah perempuan atau istri (Orapan Khemthong and Thanavutd Chutiphongdech 2021).

Efek kekerasan dalam rumah tangga sangat berpengaruh pada anak dan dapat mengakibatkan masalah emosional, seperti depresi, kebingungan emosional, gugup, takut, kemungkinan masalah adaptasi, kesulitan dan kemauan bersosialisasi dengan rekan kerja dan teman (Kunjana Mittal 2020). Keluarga yang terus-menerus melakukan kekerasan memengaruhi persepsi dan sikap anak sehingga anak tersebut mulai menganggap kekerasan sebagai perilaku yang normal. Saat anak-anak memasuki masa remaja, mereka mungkin menjadi lebih agresif dan melakukan kekerasan serta berkelahi dengan teman, di mana mereka cenderung melanjutkan kekerasan. Bagi beberapa anak, masalah tersebut dapat menyebabkan depresi, suatu keadaan seseorang yang dapat menimbulkan masalah serius, seperti neurosis, psikosis, dan bunuh diri.

Ada kesadaran yang tumbuh tentang pengalaman anak-anak tentang rumah tangga kekerasan. Ini kadang-kadang disebut sebagai 'menyaksikan' kekerasan, tetapi ini gagal menangkap cara-cara di mana anak-anak terjebak insiden pelecehan. Itu juga gagal untuk mengakui bahwa jauh dari menonton secara pasif anak-anak mengalami kekerasan dengan seluruh indranya. Oleh karena itu mungkin lebih tepat disebut sebagai anak-anak terkena atau mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Anak-anak mungkin tidak selalu amati kekerasan (dan dalam banyak kasus, pelecehan itu diwujudkan dalam psikologis dan mengendalikan perilaku oleh pelaku) tetapi mereka masih sadar bahwa pelecehan sedang terjadi.

Beberapa survei menunjukkan bahwa 12 persen anak-anak berumur di bawah sebelas tahun, 18 persen dari sebelas hingga tujuh belas tahun, berusia 18 hingga 24 tahun dan 24 persen dari usia delapan belas hingga dua puluh empat tahun pernah mengalaminya kekerasan dalam rumah tangga antara orang dewasa di rumah mereka selama masa kanak-kanak. 3 persen dari anak di bawah sebelas dan 3 persen dari anak sebelas hingga tujuh belas melaporkan paparan kekerasan dalam rumah tangga pada tahun sebelum survei. Secara keseluruhan, 24 persen dewasa muda melaporkan setidaknya memberikan kesaksian

satu episode kekerasan antara orang tua mereka, dengan 5 persen dari anak-anak yang melaporkan bahwa kekerasan itu sering terjadi dan sedang berlangsung (Devaney 2015).

B. Model Pemberdayaan

Pemberdayaan perempuan dianggap sebagai aspek utama pembangunan di seluruh dunia, khususnya di negara-negara terbelakang, akibatnya banyak organisasi nasional dan internasional mengakui bahwa tanpa pemberdayaan perempuan tidak ada harapan untuk pembangunan sosial. Diskriminasi merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh perempuan di seluruh dunia, yang membuat perempuan sulit untuk memberdayakan dirinya sendiri untuk meningkatkan statusnya. Dalam beberapa dekade terakhir, organisasi pemerintah dan non-pemerintah (LSM) telah memperkenalkan sejumlah program pengembangan masyarakat di seluruh negeri untuk meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan politik masyarakat khususnya perempuan.

Menurut Khan, sekitar 51% populasi Pakistan terdiri dari wanita dan memainkan peran penting untuk kesejahteraan keluarga dan komunitas mereka di semua tingkatan. Sayangnya, sistem sosial budaya kita membatasi perempuan untuk meningkatkan status mereka di Pakistan. Perempuan masih dirampas hak-hak dasarnya khususnya di wilayah kekuasaan. Mereka masih tidak memiliki hak untuk mengambil keputusan sendiri tentang kehidupan mereka. Mereka masih menghadapi tantangan kemiskinan, ketidaksetaraan, dan hampir tidak mendapatkan pengakuan atas perannya dalam melayani keluarganya (Khan 2007).

Pengembangan masyarakat adalah suatu pendekatan untuk membawa perubahan terencana dalam suatu komunitas. Ini melibatkan masyarakat setempat secara sistematis untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Upaya ini memberikan arah yang jelas untuk memperkuat struktur masyarakat untuk kesejahteraan manusia. Selama beberapa dekade terakhir, program pengembangan masyarakat telah mengidentifikasi

disiplin ilmu yang diminati baik oleh akademisi maupun praktisi. Banyak akademisi percaya bahwa ini adalah proses untuk membangun kapasitas orang secara kolektif dan meningkatkan keterampilan mereka. Sedangkan mayoritas praktisi mengatakan *community development* sebagai *outcome* untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan fisik masyarakat (Rhonda Phillips and Robert H. Pittman 2009).

Pengembangan masyarakat telah berkembang selama beberapa dekade terakhir menjadi disiplin ilmu yang diakui kepada para praktisi maupun akademisi. Pengembangan masyarakat didefinisikan dalam banyak hal yang berbeda cara. Sebagian besar praktisi menganggap pengembangan masyarakat sebagai hasil - peningkatan fisik, sosial, dan ekonomi dalam suatu komunitas - sementara sebagian besar akademisi menganggap pengembangan masyarakat sebagai proses - kemampuan masyarakat untuk bertindak secara kolektif dan meningkatkan kemampuan untuk melakukannya (Rhonda Phillips and Robert H. Pittman 2009) .

Menurut Pawar (2014) pengembangan masyarakat sebagai suatu proses, mengembangkan dan meningkatkan kemampuan untuk bertindak secara kolektif, dan suatu hasil, mengambil tindakan kolektif untuk meningkatkan masyarakat berbagai sektor seperti fisik, lingkungan, budaya, sosial, politik, ekonomi dan lain-lain(Pawar 2014). Pemberdayaan dihubungkan dengan kata kekuasaan. Pengertian kekuasaan mungkin berbeda dari satu tempat ke tempat lain sesuai dengan kebutuhan untuk menyelidiki dan mengklarifikasi berbagai konteks dan mungkin tergantung pada para pemain yang berpartisipasi dalam hubungan kekuasaan (Bashir 2018). Pemberdayaan sebagai “proses pembangunan partisipatif melalui mana individu, kelompok dan komunitas yang kurang mampu mendapatkan kontrol yang lebih besar atas kehidupan dan lingkungan mereka, mendapatkan sumber daya yang berharga dan hak-hak dasar, dan mendapatkan tujuan hidup yang penting dan mengurangi deprivasi masyarakat”. Pemberdayaan dalam pengertian umum merujuk pada

“kekuasaan” yang dimunculkan oleh individu atau masyarakat, sedangkan kekuasaan berarti akses dan kontrol atas materi, sumber daya intelektual dan ideologis . Pemberdayaan adalah suatu proses dimana individu, kelompok dan komunitas mencapai kendali atas variabel yang menghambat pilihan mereka dan menahan mereka dari menggunakan pilihan mereka untuk meningkatkan standar hidup mereka(Narayan 2005). Pemberdayaan sebagai peningkatan aset dan potensi dari berbagai individu, kelompok dan komunitas untuk tetap mengontrol dan mempertanggungjawabkan institusi yang mempengaruhi mereka. Menurut Chen elemen kunci dari pemberdayaan adalah hubungan, sumber daya, kesadaran, dan kekuasaan yang dibedakan dengan pemberdayaan sebagai “kontrol atas aset dan ide (Pawar 2014).

Hasil kajian menunjukkan hampir seluruh responden menerima bantuan sosial dari Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Persentase responden yang menerima bantuan adalah 85,37%. Dari sejumlah responden yang menerima, hampir seluruhnya mendapatkan bantuan tanpa melakukan upaya apapun atau dalam artian secara otomatis terdata dalam sistem DTKS. Hanya terdapat 5,26% respnden yang menyatakan mengurus sendiri pengajuan bantuan sosial berupa BST Covid dan Kartu Indonesia Pintar. Tidak didapatnya bantuan sosial oleh 5,26% responden tersebut disebabkan oleh identitas hukum yang dimiliki belum dirubah sesuai dengan status pernikahan yang saat ini.

Program jaminan kesehatan yang baru, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, mensyaratkan para kepala keluarga menunjukkan Kartu Keluarga (KK) mereka, yang menyatakan bahwa mereka memang merupakan kepala sebuah keluarga dengan jumlah anak/tanggungan sebagaimana tercantum. Perempuan yang menjadi kepala keluarga sekaligus kepala rumah tangga akan memerlukan akta cerai untuk membuktikan status mereka. Jenis bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat antara lain KIP, KIS, PKH, Bantuan Sosial Tunai Covid-19 dan BPKMS.

Seluruh reponden yang menerima bantuan sosial dari Pemerintah berpendapat bahwa bantuan yang diterima kendati tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan akan tetapi sangat bermanfaat bagi keluarga. Ibu PNH menyatakan bahwa jika bukan karna bantuan KIS yang diterima, biaya pengobatan rawat inap dan rawat jalan penyakit lambung yang diderita pasti akan membutuhkan banyak biaya. Demikian pula dengan Ibu PRS yang menyatakan bahwa nilai uang 1,1 juta rupiah yang diterima dari PKH memberikan kesempatan untuk bisa memenuhi kebutuhan biaya sekolah anak seperti membeli seragam, tas dan sepatu serta membayar hutang. Adapun KIP yang diterima digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang saku harian anak dan membeli LKS sekolah.

Selama masa pandemi covid, terdapat 70,73% responden yang mendapatkan bantuan sosial. Bantuan tersebut berupa uang BST Covid-19, bantuan bagi UMKM dan bantuan bahan makanan. Bahan makanan yang diberikan berupa bahan makanan pokok dengan nominal sekitar 180.000 per keluarga sedangkan BST untuk warga miskin sebesar Rp 300.000 dan bantuan UMKM sebesar Rp2.400.000. Warga yang menerima bantuan BST dan bahan makanan seluruhnya dibantu proses pengajuannya oleh perangkat kelurahan berkoordinasi dengan RT setempat. Adapun bantuan sosial untuk UMKM dilakukan dengan mengajukan proposal bantuan melalui Dinas Koperasi UKM Kota Surakarta dan diteruskan kepada Kementerian Koperasi UKM.

Adapun responden yang tidak menerima bantuan sosial pada saat masa darurat Covid-19 disebabkan responden telah menerima bantuan PKH dan tidak termasuk dalam daftar penerima yang ditetapkan. Ibu DRB sebagai penerima PKH tidak menerima bantuan BST Covid-19 pada tahun 2020 dan 2021. Kondisi yang sama juga terjadi kepada Ibu SDR yang juga tidak menerima bantuan karena telah terdaftar sebagai penerima PKH.

Lebih dari 90% responden yang menerima bantuan sosial menyatakan bahwa bantuan sosial yang diberikan telah sesuai

dengan kebutuhan. Hanya terdapat 8,33% responden yang menyatakan bantuan sosial tidak sesuai. Ibu SNT menyatakan bahwa bantuan sosial yang paling dibutuhkan adalah Kartu Indonesia Pintar untuk menambah biaya kebutuhan sekolah anak dibandingkan sembako dan uang tunai. Ibu RAW juga mengungkapkan kondisi yang sama dimana bantuan uang tunai BST kurang bermanfaat dibandingkan dengan pelatihan keterampilan agar mampu menghasilkan uang di masa pandemi covid-19 saat ini. Kondisi tersebut senada dengan Ibu SRW yang menyatakan bahwa pelatihan keterampilan agar dapat berusaha di tengah kondisi Covid-19 jauh lebih berguna dibandingkan bantuan sembako dan uang tunai Rp300.000.

Pemberdayaan perempuan pada hakekatnya adalah proses peningkatan ekonomi, sosial dan status politik perempuan, yang secara tradisional kurang mampu, di masyarakat. Ini adalah prosesnya melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan. Pemberdayaan perempuan melibatkan pembangunan masyarakat, lingkungan politik, di mana perempuan dapat bernapas tanpa rasa takut akan penindasan, eksploitasi, ketakutan, diskriminasi dan perasaan penganiayaan umum yang terjadi dengan menjadi seorang wanita dalam struktur tradisional yang didominasi laki-laki.

Pemberdayaan sebagai aset dan kemampuan orang miskin untuk berpartisipasi, bernegosiasi dengan, mempengaruhi kontrol dan memegang institusi akuntabel yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan perempuan sangat penting bagi pembangunan masyarakat (Narayan 2005). Pemberdayaan berarti individu memperoleh kekuatan untuk berpikir dan bertindak secara bebas, melaksanakan pilihan dan memenuhi potensi mereka sebagai anggota masyarakat yang utuh dan setara. Sesuai *United National Development Fund for Women* (UNIFEM), yang dimaksud dengan pemberdayaan perempuan adalah:

1. Memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang relasi gender dan cara- caranya relasi dapat diubah.

- 2 Mengembangkan rasa harga diri, keyakinan pada kemampuan seseorang untuk mengamankan perubahan yang diinginkan dan hak untuk mengatur kehidupan seseorang.
- 3 Memperoleh kemampuan untuk menghasilkan pilihan melatih daya tawar.
- 4 Mengembangkan kemampuan mengorganisasikan dan mempengaruhi arah perubahan sosial, mencipta tatanan sosial dan ekonomi yang lebih berkeadilan, secara nasional dan internasional.

Dengan demikian, pemberdayaan berarti rasa psikologis kontrol pribadi atau pengaruh dan perhatian dengan pengaruh sosial aktual, kekuatan politik dan hak-hak hukum. Ini adalah referensi konstruk bertingkat kepada individu, organisasi dan masyarakat. Ini adalah proses berkelanjutan internasional yang berpusat di masyarakat setempat, yang melibatkan rasa saling menghormati, refleksi kritis, kepedulian dan partisipasi kelompok, di mana orang-orang yang kekurangan bagian yang sama dari sumber daya berharga mendapatkan akses yang lebih besar ke kontrol atas sumber daya tersebut.

Pemberdayaan perempuan berarti memperoleh kekuatan untuk berpikir, bertindak bebas, mengembangkan rasa harga diri, keyakinan pada kemampuan seseorang untuk membuat perubahan yang diinginkan dan hak untuk mengendalikan hidup seseorang, menjalankan pilihan, daya tawar, dan memenuhi potensi mereka sebagai anggota masyarakat yang setara. Pemberdayaan pada umumnya adalah segala proses dan kegiatan yang dilakukan oleh perempuan untuk mengendalikan kehidupannya.

Literatur terkait pemberdayaan secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat kategori. Berorientasi individu yang meliputi perasaan pribadi, kekuatan pribadi, penentuan nasib sendiri, dan kognitif lainnya variabel (Baird, 1994; Fulford dan Enz, 1995; Spreitzer, 1995), studi berorientasi hasil yang memiliki memeriksa kasus pemberdayaan yang berhasil

(Berman, 1995; Burbidge, 1995). Literatur berorientasi operasi yang menjelaskan kualitas pemberdayaan pertemuan melalui penundaan organisasi, keterlibatan karyawan, membangun komitmen, kerja sama, dan intervensi (Bogg, 1995; Lashley, 1995; Nixon, 1994; Osborne, 1994). Pemberdayaan perempuan merupakan bagian dari pemberdayaan psikologis yang memiliki model dimensi yaitu : dampak / penentuan nasib sendiri, menjadi bermakna, pertumbuhan profesional, kemandirian/ pengambilan keputusan, kompetensi/kemajuan diri dan kepercayaan.

BAB VIII

PENUTUP

Adaptasi dan daya lenting perempuan kepala keluarga miskin dalam pasca pandemi covid-19 sangat bagus. Rata-rata hampir 90 persen mereka mampu mengatasi walaupun memerlukan perjuangan. Dukungan keluarga cukup baik meskipun beban mereka cukup berat.

Model yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan dan menguatkan perempuan kepala keluarga miskin meskipun belum memuaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin namun mampu menggerakkan roda perekonomian keluarga. Upaya ini ditempuh selain dengan memberikan bantuan modal juga bantuan teknis lainnya seperti bantuan pendidikan untuk anak-anak, bantuan kesehatan, bantuan beras, bantuan listrik.

Upaya lain yang berkontribusi bagi bergeraknya ekonomi keluarga pasca pandemi covid-19 adalah situasi dan kondisi pasar dan masyarakat yang makin membaik. Secara umum kondisi ini turut serta menguatkan ekonomi masyarakat miskin. Usaha yang selalu menyesuaikan keadaan saat pandemi covid-19 mulai stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Addae-Korankye, Alex. 2019. "Theories of Poverty: A Critical Review." *An International Peer- Reviewed Journal* 48. doi: 10.7176/JPID.
- Bashir, Siraj. 2018. *Women Empowerment through Community Development Programs in Balochistan*. 1st ed. edited by Bashir. Pakhstan: Balochistan Study Centre, University of Balochistan, Quetta-Pakistan.
- Bhavin H, and Smt K. C M Shah BEd. 2013. *Social Interaction Model*. Vol. 2. BPS. 2022. *JUMLAH PENDUDUK MISKIN JATENG 2020-2021*.
- Budgeon, Shelley. 2015. "Individualized Femininity and Feminist Politics of Choice." *European Journal of Women's Studies* 22(3):303-18. doi: 10.1177/1350506815576602.
- Chant, Sylvia. 1997. "Women-Headed Households: Poorest of the Poor? Perspectives from Mexico, Costa Rica and the Philippines." *IDS Bulletin* 28(3):26-48.
- Chant, Sylvia. 2008. "The 'feminisation of Poverty' and the 'Feminisation' of Anti-Poverty Programmes: Room for Revision?" *Journal of Development Studies* 44(2):165-97. doi: 10.1080/00220380701789810.
- David Chitate. 2020. *Introduction Triangulation*. Vol. 1. I. edited by David Chitate. UNAIDS. Davis, Philip, and Miguel Sanchez-Martinez. 2015. *ECONOMIC THEORIES OF POVERTY*. UK.
- Devaney, John. 2015. "Research Review: The Impact of Domestic Violence on Children." *IRISH PROBATION JOURNAL* 12.
- Doyle, Louise, Anne Marie Brady, and Gbnait Byrne. 2016. "An Overview of Mixed Methods Research - Revisited." *Journal of Research in Nursing* 21(8). doi: 10.1177/1744987116674257.
- Ewuim, Ngozi C., Florence C. Agbodike, and C. Justine Igbokwe-Ibeto. 2015. "Gender Inequality , Poverty Alleviation and Sustainable Development in Nigeria : Lessons from the Rapti Women Empowerment Project , Nepal." *International*

- Journal of Accounting Research 2(7):37-50. doi: 10.12816/0017349.
- Gani, Irwan. 2021. "Poverty of Women and the Covid-19 Pandemic in Indonesia." Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences 4(1):1034-41. doi: 10.33258/birci.v4i1.1710.
- Godoy, Lorena., and Sonia (Montaño Virreira) Montaño. 2004. Understanding Poverty from a Gender Perspective. United Nations, Women and Development Unit, Economic Commission for Latin America and the Caribbean.
- Ijaiya, Mukaila Adebisi, and Ganiyat A. Adesina-Uthman. 2019. "DOES POVERTY DISCRIMINATE BETWEEN GENDERS? AN EXAMINATION OF HOUSEHOLD POVERTY IN NIGER STATE."
- Indrawan, Deni, and Siti Rahmi Jalilah. 2021. "Metode Kombinasi/Campuran Bentuk Integrasi Dalam Penelitian." Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran, 4(3):735-39. doi: 10.30605/jsgp.4.3.2021.1452.
- Indriyani, Ina Eka. 2021. "Social Interaction Contents on Social Studies Learning to Improve Social Skills." The Innovation of Social Studies Journal 2(2):2723-1119. doi: 10.20527/Available.
- Kabeer, Naila. 1999. "Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment." Development and Change 30:345-464.
- Kabeer, Naila. 2015. "Gender, Poverty, and Inequality: A Brief History of Feminist Contributions in the Field of International Development." Gender and Development 23(2):189-205. doi: 10.1080/13552074.2015.1062300.
- Kaundjua, Maria Bernadethe. 2007. "GENDER DIMENSIONS OF POVERTY AND THE MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDGS) IN NAMIBIA." in Conference: Union for African Population Studies Fifth African Population Conference:10-14 December 2007: Arusha, TanzaniaAt: Arusha, Tanzania, edited by Kaundjua. Tanzania.

- Khan, Ayesha. 2007. *Women And Paid Work in Pakistan*.
- Kunjana Mittal. 2020. "Impact of Domestic Violence on Children." *International Journal of Innovative Science and Research Technology* 5(5). doi: 10.4172/2472.
- Lopez, M. Lisette, and Carol B. Stack. 2017. *Social and Cultural Theories of Poverty: Community Practices and Social Change*. UK.
- Mahfud, Mahfud, and Rizanizarli Rizanizarli. 2021. "Domestic Violence against Women in Indonesia: The Recent Domestic Violence Elimination Law Analysis." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 15(4):385-98. doi: 10.25041/fiatjustisia.v15no4.2276.
- ManjunathaN. 2019. "Descriptive Research." *JETIR1908597 Journal of Emerging Technologies and Innovative Research* 6.
- Munoz Boudet, Ana Maria, Paola Buitrago, Benedicte Leroy De La Briere, David Newhouse, Eliana Rubiano Matulevich, Kinnon Scott, and Pablo Suarez-Becerra. 2018. *Gender Differences in Poverty and Household Composition through the Life-Cycle A Global Perspective*. 8360. New York.
- Narayan, Deepa. 2005. *MEASURING EMPOWERMENT CROSS-DISCIPLINARY PERSPECTIVES*
 EDITED BY. Vol. 1. 1st ed. edited by Narayan. Washington, DC: THE WORLD BANK Washington, DC.
- Nindya Putri, Oktaviani, Rudi Saprudin Darwis, and Gigin Ginanjar Kamil Basar. n.d. "Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga." in *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*.
- Orapan Khemthong and Thanavutd Chutipongdech. 2021. "Domestic Violence and Its Impacts on Children: A Concise Review of Past Literature." *Walailak Journal of Social Science* 14(6).
- Owusu-Afriyie, John, and Edward Nketiah-Amponsah. 2014. "An Individual Level Test of the 'Feminization of Poverty' Hypothesis: Evidence from Ghana." *Journal of Developing Societies* 30(1):25-43. doi: 10.1177/0169796X13516351.

- Pawar, Manohar. 2014. *Social and Community Development Practice*. Vol. 1. 1st ed. edited by Manohar Pawar. SAGE Publications Inc.
- Rhonda Phillips and Robert H. Pittman. 2009. *AN INTRODUCTION TO COMMUNITY DEVELOPMENT*. Vol. 1. 1st ed. edited by Rhonda Phillips and Robert H. Pittman. Routledge.
- Rivara, Frederick, Avanti Adhia, Vivian Lyons, Anne Massey, Brianna Mills, Erin Morgan, Maayan Simckes, and Ali Rowhani-Rahbar. 2019. "The Effects of Violence on Health." *Health Affairs* 38(10):1622-29. doi: 10.1377/hlthaff.2019.00480.
- Ruggeri Laderchi, Caterina, Ruhi Saith, and Frances Stewart. 2003. "Does It Matter That We Do Not Agree on the Definition of Poverty? A Comparison of Four Approaches." *Oxford Development Studies* 31(3):243-74. doi: 10.1080/1360081032000111698.
- Suharnanik, Suharnanik. 2020. "Women and Make-Up: The Dilemma of Bourdieu's Subjectivism- Objectivism on Social Media." *The Journal of Society and Media* 4(1):16. doi: 10.26740/jsm.v4n1.p16-30.
- Syukri, Muhammad. 2021. *Gender Equality in Indonesian New Developmental State: The Case of the New Participatory Village Governance SMERU Working Paper*. Jakarta.
- Terjesen, Siri. 2014. A. Sen's "Development as Freedom." Vol. 1.
- Torrance, Harry. 2012. "Triangulation, Respondent Validation, and Democratic Participation in Mixed Methods Research." *Journal Mixed Method Research*.
- UNDP Turkmenistan. 2021. *The Impact of Covid-19 on Female Emplpyoeyes and Women Entrepreneurs*.

Model Aksi Perempuan

Kepala Keluarga Miskin Menghadapi Perubahan Konstalasi Pasca Meredupnya Covid-19

Perempuan kepala keluarga miskin yang pada saat pandemic covid-19 harus berjuang keras, sedikit demi sedikit mulai membuka jalan untuk meretas kerentanan. Aksesibilitas yang mulai terbuka mendorong mereka untuk semakin peka terkadap perubahan jaman. Dukungan keluarga terutama anak-anak menjadi penguat untuk bangkit dan berdiri setiap kali jatuh. Tak banyak kata, kerja dan kerja untuk menghidupi keluarga menjadi penting dalam hidup perempuan kepala keluarga miskin.

Berbagai temuan kajian menunjukkan semakin kompleksnya persoalan perempuan kepala keluarga miskin, hingga diperlukan perlakuan khusus untuk menanganinya. Persoalan hak-hak anak-anak mereka yang jauh dari jangkauan, juga tidak luput dari kaca mata kajian ini. Pemerintah dan pemerintah Kota sudah berupaya, namun jangkauan untuk meraih mereka belum sepenuhnya terlampaui.

Kajian ini menjadi fiding yang menghasilkan naskah akademik untuk perlindungan anak. Ini adalah wujud keberpihakan untuk mengurai persoalan keluarga perempuan kepala keluarga miskin. Naskah akademik dan Ranperda Perlindungan Anak menjadi salah satu kebijakan public untuk memenuhi hak-hak anak-anak keluarga perempuan miskin sekaligus hak-hak anak-anak di Kota Surakarta.

ISBN 978-623-455-706-0

